



# BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**LKJiP  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Komitmen dalam penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021 telah banyak membawa hasil yang positif. Dari 3 indikator kinerja utama semua telah memenuhi target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan namun peningkatannya

belum menunjukkan angka-angka yang berarti bila dibanding dengan tingkat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Bone. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkennaan dengan itu, LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 14 Februari 2022

**KEPALA BAPENDA KAB. BONE**



  
**MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	/
DAFTAR ISI .....	<i>iii</i>
DAFTAR LAMPIRAN .....	<i>V</i>
DAFTAR TABEL & GAMBAR .....	<i>vi</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. <b>UMUM .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Landasan Hukum .....	2
B. <b>ORGANISASI .....</b>	<b>3</b>
1. Tugas dan Fungsi .....	3
C. <b>ISU STRATEGIS .....</b>	<b>7</b>
D. <b>ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
A. <b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>7</b>
B. <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>13</b>
1. Strategi .....	13
2. Arah Kebijakan .....	14
C. <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA .....</b>	<b>16</b>
D. <b>PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>18</b>

<b>E.</b>	<b>STANDAR PENILAIAN KINERJA .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
<b>A.</b>	<b>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b>	<b>23</b>
1.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	24
2.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 .....	25
3.	Realisasi Kinerja yang mengacu pada target Jangka Menengah Renstra ..	32
4.	Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya .....	36
5.	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan .....	36
6.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	42
7.	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	45
8.	Realisasi Anggaran .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
<b>A.</b>	<b>KESIMPULAN UMUM .....</b>	<b>60</b>
<b>B.</b>	<b>KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI .....</b>	<b>60</b>

# DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
<b>LAMPIRAN I</b>	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....
<b>LAMPIRAN II</b>	Penerimaan PAD Tahun 2021 .....
<b>LAMPIRAN III</b>	Matriks Renstra 2018 - 2023 .....
<b>LAMPIRAN IV</b>	Cascading .....
<b>LAMPIRAN IV</b>	Cross Cutting .....



## DAFTAR GAMBAR & TABEL

	Halaman	
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	5
Gambar 1.2	Dokumentasi Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	8
Gambar 1.3	Dokumentasi Sosialisasi Pajak Hotel	9
Gambar 1.4	Piagam Penghargaan	28
Gambar 1.5	Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Memuaskan	29
Tabel 2.1	Matriks Tujuan Sasaran Renstra 2021-2023	9
Tabel 2.2	Rumus Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	15
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	16
Tabel 2.4	IKU Bapenda pada Renstra 2018-2023	17
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021	21
Tabel 2.6	Standar Penilaian Kinerja	22
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bone	15
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023	26
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2018-2022	30
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	32
Tabel 3.5	Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja	36
Tabel 3.6	Realisasi PAD Tahun 2021	37
Tabel 3.7	Realisasi Perbandingan PAD Tahun 2020 daan Tahun 2021	40
Tabel 3.8	Efisiensi Sumber Daya	42
Tabel 3.9	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	45
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Athun 2021	58

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Semangat reformasi telah mewarnai Pemerintah Daerah/Organisasi, Aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good Governance. Agar sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, dengan konsep dasar akuntabilitas yang sasarannya pada klasifikasi, responsibilitas manajerial dari setiap bagian, dan masing masing individu bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang nyata dan benar-benar direncanakan, dilaksanakan serta direalisasikannya. Upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) membutuhkan komitmen yang kuat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik dan sikap konsisten. Berkaitan dengan hal itu maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang tegas, utuh dan bersinergi dari keempat nilai/prinsip berikut yaitu transparansi, partisipasi, penegakan hukum, dan akuntabilitas yang nantinya dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi prinsip yang bersifat implementatif dalam setiap tugas pokok organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan oleh masing-masing instansi pemerintah kepada Bupati yang dilaksanakan selama.

#### **2. MAKSDUD DAN TUJUAN**

LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang kerberhasilan dan kegagalan pencapain tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### **3. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Surat Edaran Menpan no. Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
9. Peraturan Bupati Bone No. 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone No 71 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

## B. ORGANISASI

### 1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mempunyai fungsi untuk penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

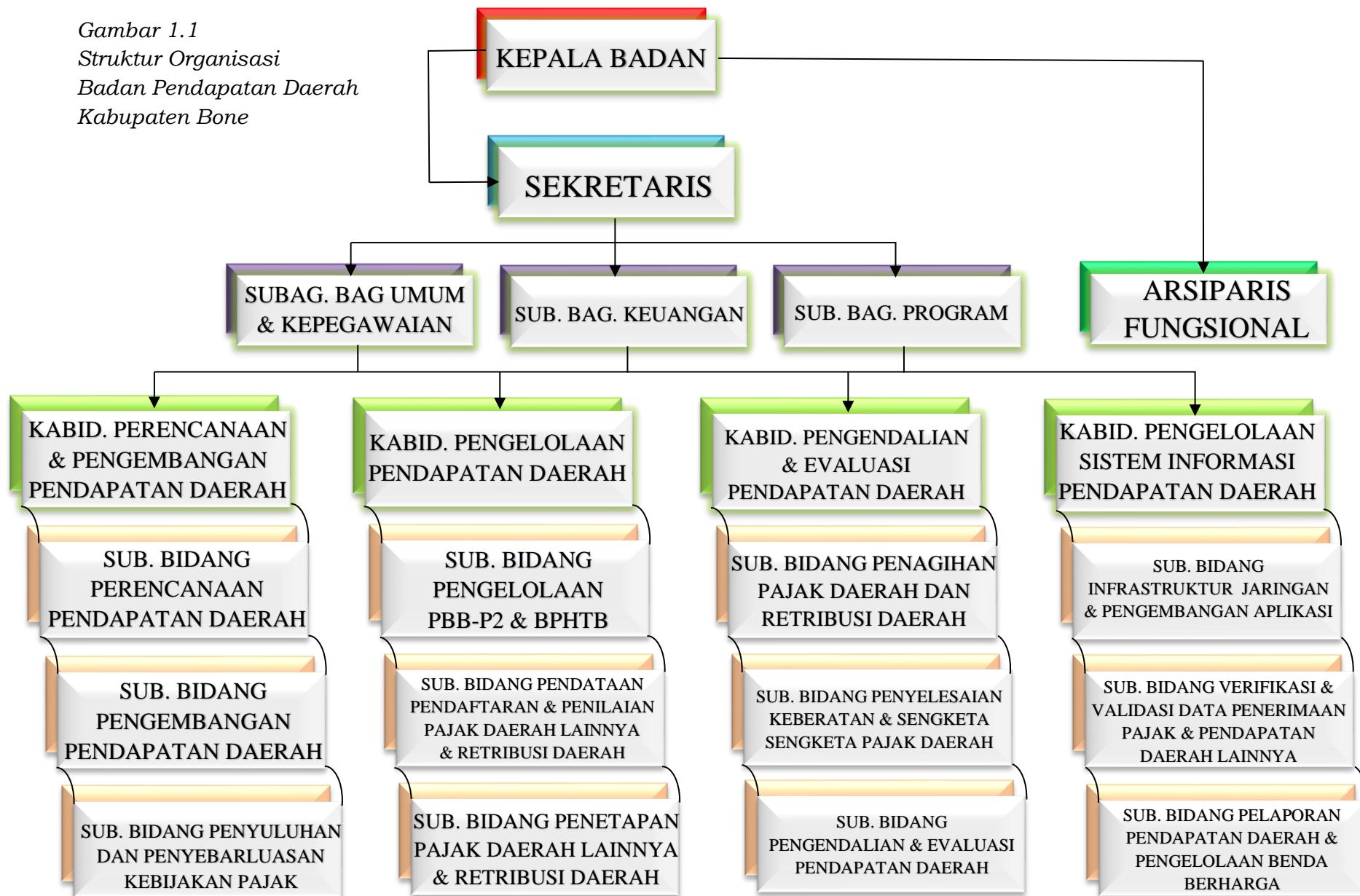
Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas

dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan daerah

- b. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang pengendalian & evaluasi pendapatan daerah
- c. penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis, serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan & pengembangan pendapatan daerah

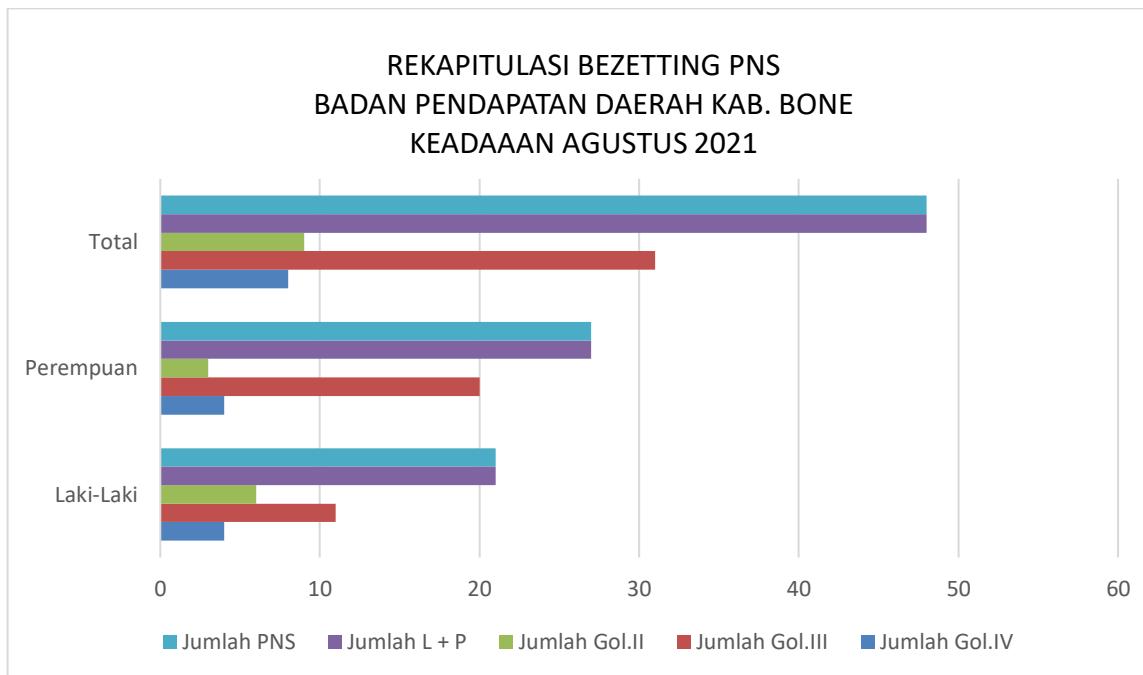
Gambar 1.1  
Struktur Organisasi  
Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bone



## LKJUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021

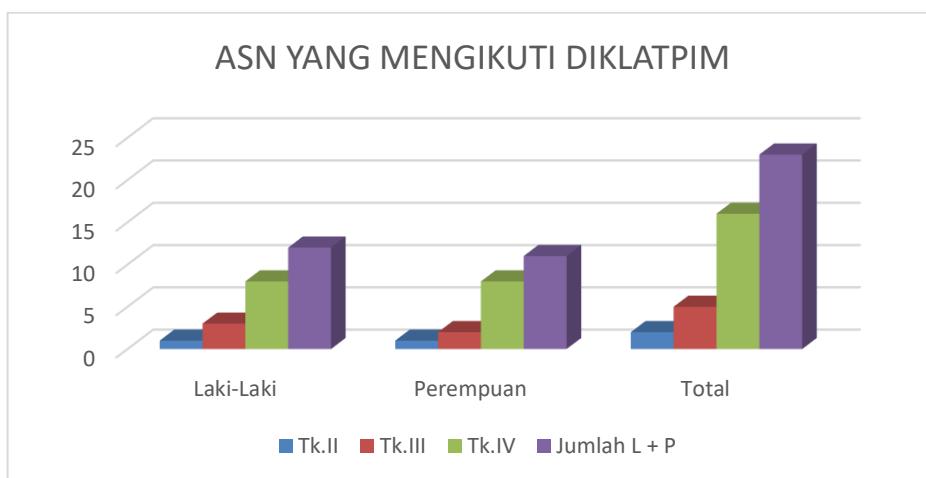
Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone sebagai berikut:

Diagram 1



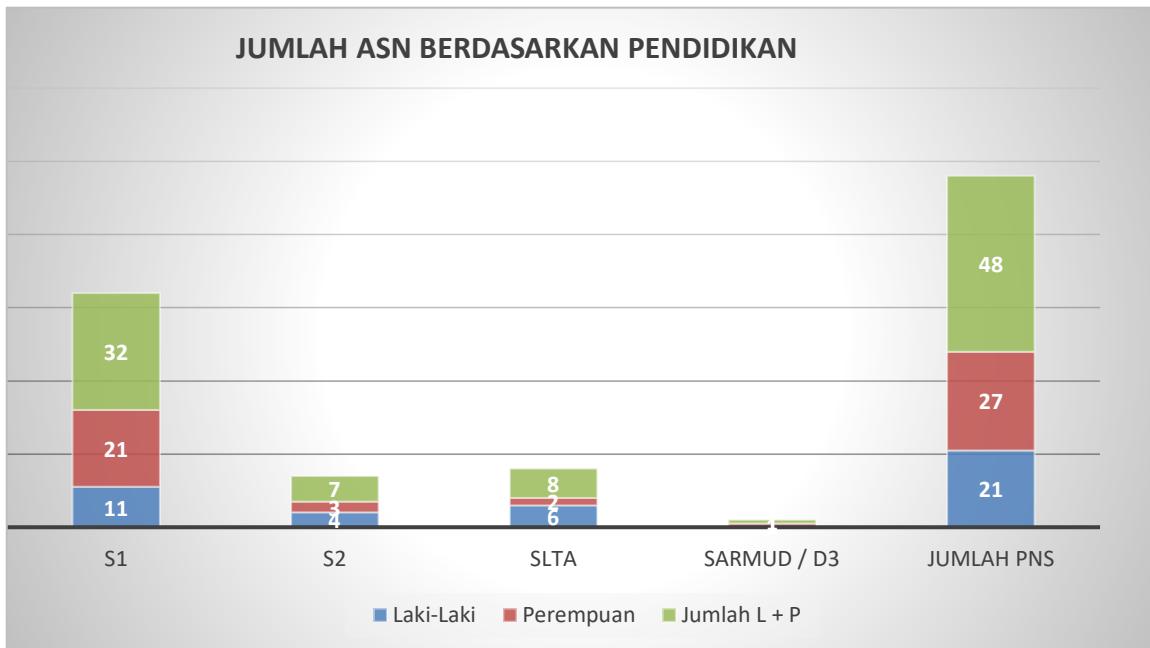
Berdasarkan diagram diatas Jumlah ASN lingkup Badan Pendapatan Daerah sejumlah 48 orang. Aparatur Sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone masih didominasi oleh perempuan sebanyak 27 perempuan dan laki-laki sebanyak 21 orang. Untuk Golongan II sebanyak 9 orang dan golongan III sebanyak 31 orang, sedangkan golongan IV sebanyak 9 orang.

Diagram 2



ASN yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sebanyak 22 orang. Yang telah mengikuti Diklatim II sebanyak 1 Orang, Diklatpim III sebanyak 5 orang dan Diklatpim IV sebanyak 16 orang

Diagram 3



Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah ASN yang memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 32 orang , S2 sebanyak 7 orang dan SMA sebanyak 8 orang.

### C. ISU STRATEGIS

Tantangan dalam Pelayanan pada Era globalisasi dan keterbukaan informasi, diharapkan pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu juga mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah-daerah strategis dan potensial, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak daerah/retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone didalam melaksanaan tugas dan fungsi menghadapi beberapa permasalahan/kendala yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak tersedianya SDM penilai pajak, pemeriksa pajak, juru sita dan penyuluh pajak

2. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah
3. Kontribusi/Rasio PAD terhadap APBD masih rendah

#### D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar menjadi SDM yang lebih handal dan berkompeten
2. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah
3. Pengelolaan Pelayanan Pajak Daerah Berbasis IT
4. Optimalisasi pelayanan pajak daerah

*Gambar 1.2  
Dokumentasi Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah*



Gambar 1.3  
*Dokumentasi Sosialisasi Pajak Hotel*



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Tujuan dan Sasaran**

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sesuai dengan visi Pemerintahan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

**MASYARAKAT BONE YANG  
MANDIRI, BERDAYA SAING &  
SEJAHTERA**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi, yakni “Masyarakat Bone yang Mandiri”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Adapun misi Kabupaten Bone pada RPJMD Perubahan 2018-2023 terdapat pada misi pertama yaitu

#### **Misi I**

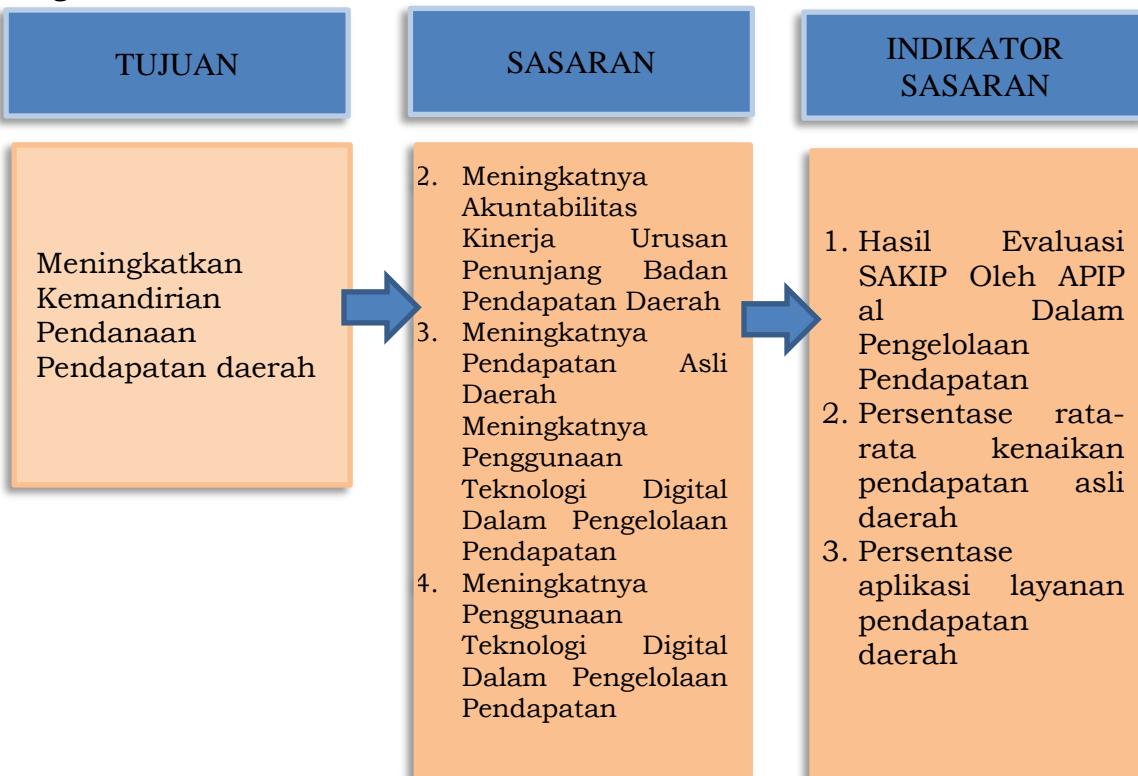
**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,  
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme**

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone maka dirumuskan sasaran yang merupakan merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Bapenda Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :



Pernyataan tujuan dan target jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan daerah</b>	<b>Rasio PAD</b>			<b>10.50 %</b>	<b>10.62%</b>	<b>10.50%</b>
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang badan pendapatan derah	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP			B	BB	BB
2 Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah			13.35%	6.50%	6.50%
3 Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah			100	100	100

Sumber Data: Renstra Perubahan Bapenda Tahun 2018-2023



SCAN ME

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone terdapat Satu tujuan dan 3 sasaran yang akan di capai. Tujuannya adalah meningkatkan kemandirian pendanaan pendapatan daerah dengan indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah . Adapun sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang badan pendapatan derah dengan indikator hasil evaluasi Sakip oleh APIP pada tahun 2021 diharapkan mendapat nilai BB.

Adapun sasaran 1.2 yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli daerah dengan indikator kinerja Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 13.5% untuk tahun 2021. Sedangkan sasaran 1.3 yaitu Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan dengan indikator kinerja Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah dengan target 100%.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan**

### **1. Strategi**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Perangkat Daerah.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kuantitas Tata Kelola Pendapatan Daerah
2. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber PAD
3. Mendorong partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan PAD
4. Meningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja

## **2. Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran dan tujuan.. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Kapabilitas Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Inovasi Dan Pemanfaatan IT
- 2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah
- 3) Peningkatan Sarana & Prasarana pada Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
- 4) Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan atas Pengelolaan PAD
- 5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait Pajak & Retribusi Daerah

- 6) Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi
- 7) Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan PAD bagi Pembangunan Daerah
- 8) Peningkatan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja.

Rumusan Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 2.2*

<b>VISI : Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>			
<b>MISI : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN )</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio PAD</b>		
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Pengendalian &amp; Pengawasan atas Pengelolaan PAD</li> <li>2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait Pajak &amp; Retribusi Daerah</li> </ol>
	Meningkatnya Penggunaan Teknologi Digital Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengembangan Kapabilitas Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui Inovasi Dan Pemanfaatan IT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana &amp; Prasarana pada Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah</li> <li>2. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak &amp; Retribusi Daerah</li> <li>3. yang berbasis Teknologi Informasi Sosialisasi kepada masyarakat</li> </ol>

			terkait pengelolaan PAD bagi Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja	Peningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja

Sumber Data: Renstra Perubahan Bapenda Tahun 2018-2023

### C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja perangkat daerah utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap perangkat daerah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, perangkat daerah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. Dapat diuraikan pada table berikut:

*Tabel 2.3*

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

No	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja
1.	<b>Tujuan : Meningkatkan kemandirian pendanaan</b>	<b>Rasio PAD</b>	<b>persen</b>	<b>Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>

**LKJiP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

	<b>pendapatan daerah</b>			
1.1	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	Nilai Capaian Target Kinerja ditentukan berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP yang dipublikasikan Oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone
1.2	Sasaran: Meningktanya Pendapatan Asli daerah	Persentase Rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	persen	<u>Realisasi PAD N –Realisasi PAD (-N)</u> $\times 100$ Realisasi (-N) Ket : (N) Tahun ini (-N) Tahun Lalu Sumber data: Realisasi Pendapatan
1.3	Sasaran : Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	Perse	<u>Persentase realisasi aplikasi layanan pendapatan X100</u> <u>Persentase jumlah aplikasi layanan pendapatan daerah</u>

*Sumber Data: Perbup Bone 101 Tahun 2021*

Berikut adalah indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah selama perencanaan 5 tahun yang tertuang pada Rencana Strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone .

Tabel 2.4  
IKU Bapenda pada Renstra 2018-2023

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Kinerja Pada Tahun ke-</b>				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan daerah</b>	<b>Rasio PAD</b>			<b>10.50 %</b>	<b>10.62%</b>	<b>10.50%</b>

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang badan pendapatan daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP			B	BB	BB
2 Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah			13.35%	6.50%	6.50%
3 Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah			100	100	100

Sumber Data Renstra Perubahan Bapenda 2018-2023

#### **D. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja digunakan sebagai :

- 1) wujud komitmen antara penerima dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) tolok ukur evaluasi kinerja aparatur;

- 3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai Perjanjian Kinerja Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan target kinerja tahun ketiga dari Renstra Bapenda Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU).

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

### **Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja**

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (Persen)</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Rasio PAD</b>	<b>10,50</b>		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	B	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota	9,877,786,773
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	13.35	Pengelolaan Pendapatan daerah	4,163,622,000
	Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100		
<b>Jumlah</b>					<b>14,041,408,773</b>

*Sumber Data: Perjanjian Kinerja Bapenda Tahun 2021*

#### **E. Standar Penilaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

Standar Penilaian Kinerja



Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

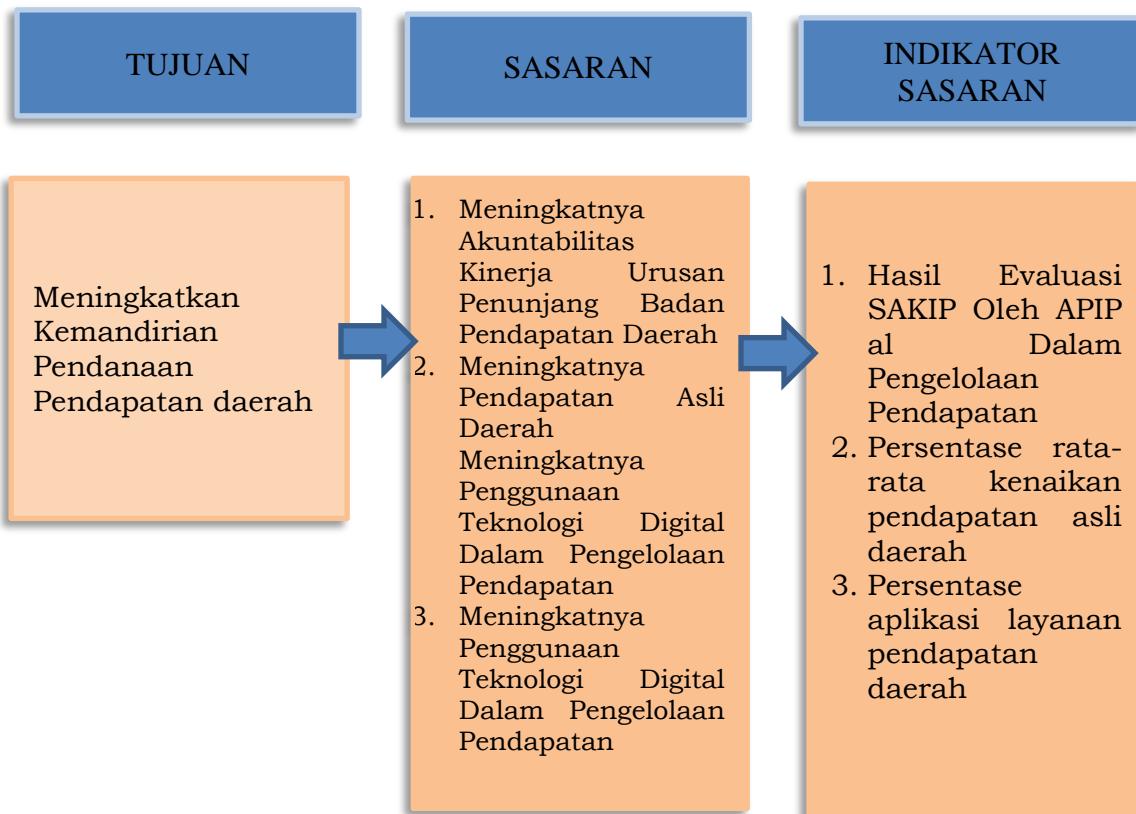
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam kurun tahun 2021 menetapkan tujuan yaitu meningkatkan "Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah"

Dengan adanya penyataan tujuan, maka akan jelas bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone melaksanakan penilaian kinerja berpedoman pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yang telah disepakati pada awal tahun. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satunya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah

melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Badan Pendapatan daerah tahun 2021

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 maka ditetapkan tujuan, strategis beserta indikator kinerja sebagai berikut :



### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja pada Bapenda Kabupaten Bone untuk Tahun 2021 :

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021  
Badan Pendapatan Daerah

<b>VISI</b>
<i>Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</i>
<b>MISI</b>
<i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN .)</i>

**LKJiP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

Tujuan/Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi tahun 2021	Capaian	Kategori
<b>1. Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio PAD</b>	<b>10,50%</b>	<b>7,69%</b>	<b>73,27%</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	1 Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	B (4)	BB (5)	125%	Sangat Tercapai
1.2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	2 Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	13.35	-34,78	-260.52	Tidak tercapai
1.3 Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	3 Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100	100	100	Sangat Tercapai
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja</b>				9.44	Tidak tercapai

*Sumber Data: Kertas Kerja Evaluasi Kinerja Bapenda Tahun 2021*

Berdasarkan table diatas rata-rata capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk Tahun 2021 yaitu 9,44 dengan kategori tidak tercapai. Untuk sasaran 1.1 dan sasaran 1.3 dengan kategori sangat tercapai dengan nilai lebih dari 100% sedangkan untuk sasaran 1.2 dengan kategori tidak tercapai.

## **2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

. Adapun realisasi dan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

**LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data awal	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio PAD</b>	<b>23.91</b>	<b>9.43</b>	<b>11.47</b>	<b>7.69</b>				<b>104.43</b>	<b>126.74</b>	<b>73.24</b>		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B (4)	BB (5)	BB (5)				100	125	125		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	-23.61	7.57	17,79	(34.78)				1182.81	301.53	(260.52)		
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	*				100					100		

Sumber Data : Renstra Perubahan 2018-2023

Berdasarkan data table diatas menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang sangat signifikan antara realisasi target dan capaian kinerja dengan penejelasan sebagai berikut :

**TUJUAN :** Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah

**Indikator :** Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Untuk target Renstra pada Tahun 2021 rasio pendapatan daerah terhadap PAD sebesar 10,50% dengan realisasi kinerja sebesar 7,69% atau realisasi sebesar Rp. 2,301,218,013,615,- dan Jumlah PAD sebesar Rp. 177,042,099,868. Dalam hal ini target Rentsra tidak tercapai karena berkurangnya jumlah bantuan penanganan Covid 19 yang semula dianggarkan pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi pada ahun 2021.

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk periode Renstra 2018-2023 jumlahnya fluktuatif. Capaian kinerja Rasio PAD terhadap pendapatan di awal renstra sebesar 23,91% mengalami penurunan pada tahun 2021.

**Sasaran I:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

**Indikator :** Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

Pada tabel 3.2 Capaian indikator kinerja pada tabel Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP telah melebihi target yang ditentukan yaitu predikat BB dari target B, dengan demikian Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan

Daerah tercapai 125 %. Sedangkan pada tabel 3.7 menunjukkan hasil evaluasi SAKIP oleh APIP dengan predikat BB, dari segi predikat hasil evaluasi SAKIP mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2019 mendapat predikat B dengan nilai 68,46 dan pada Tahun 2020 mendapat Predikat BB dengan nilai 70,6. Selanjutnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.7 untuk tahun 2021 Predikat BB dengan nilai 73,21 dengan indikator kinerja sasaran Tahun 2021 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja Tahun keempat (2021) Renstra mendapatkan predikat BB dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun terakhir periode Renstra (2023) dengan predikat BB.

Gambar 1.4 Piagam Penghargaan



Sasaran II: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah  
Indikator : Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah

Komponen PAD yang diharapkan mengalami pertumbuhan cukup cepat setiap tahunnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Di Kabupaten Bone, penerimaan pajak daerah untuk tahun 2018 sebesar Rp 51,23 miliar kemudian meningkat menjadi Rp 60,49 miliar pada tahun 2021 atau secara rata-rata bertumbuh 7,98 persen per tahun. Sumbangan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah mengalami peningkatan secara rata-rata 7,98 persen per tahun selama periode 2018-2021.

Selanjutnya, penerimaan retribusi daerah selama periode 2018-2021 menurun dari kisaran antara Rp 22,18 miliar dan Rp 19,28 miliar. Pendapatan retribusi terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp 22,18 miliar. Realisasi retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang cukup tidak stabil sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai angka 13,62 persen per tahun. Proporsi retribusi daerah terhadap total PAD tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 8,17 persen selanjutnya setiap tahun menurun hingga mencapai 13,04 persen pada tahun 2021. Penurunan nilai dan sumbangannya retribusi daerah di Kabupaten Bone dapat disebabkan oleh banyak faktor sehingga kedepan perlu mendapat perhatian penuh. Komponen PAD yang lain adalah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan daerah nampaknya masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya akan tetapi pada tahun 2021 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan dari Rp 10,64 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 13,68 miliar pada tahun 2021 atau bertumbuh secara rata-rata 19,77 persen per tahun.

Adapun Lain-Lain Pendapatan Yang Asli Daerah Yang Sah yang merupakan komponen ke empat dari Pendapatan Asli daerah yang setiap tahun jumlahnya fluktuatif. Yang disebabkan Pencatatan pada penerimaan pendapatan daerah sering berubah-ubah. Selama

periode Tahun 2018-2021 mengalami penurunan. Antara tahun 2020 dan 2021 menurun sebesar -54,55% diakibatkan berbagai faktor. Salah satunya diakibatkan oleh berkurangnya penerimaan jasa giro liquiditas karena pengeluaran dana dari kas daerah semakin lancar

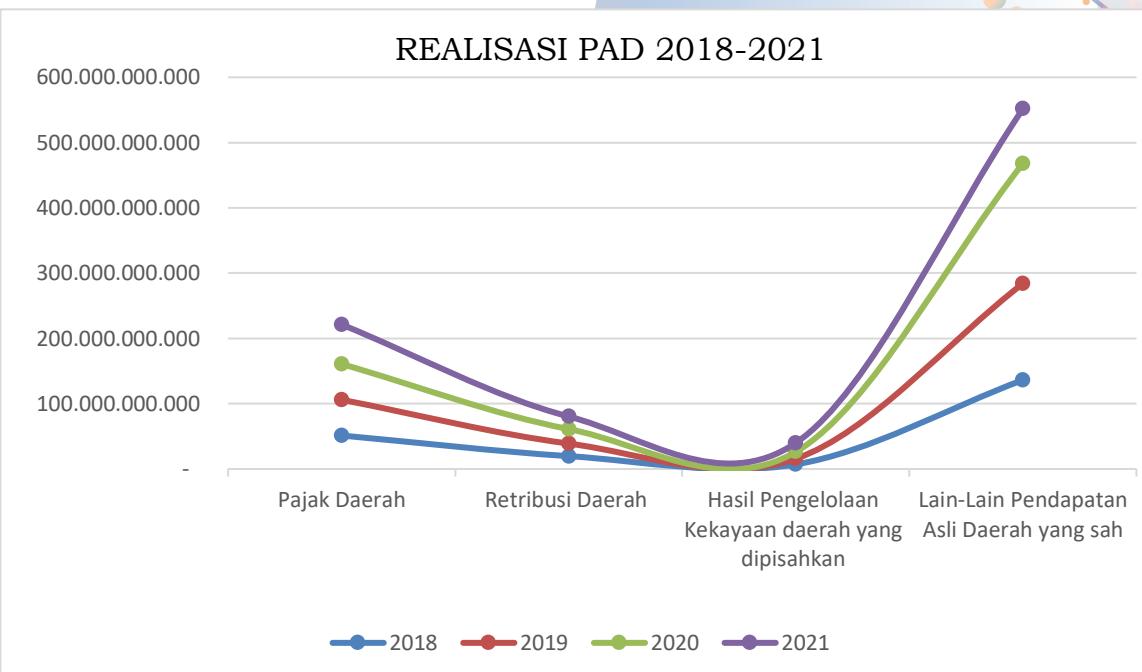
Secara rinci rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2021, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2018-2022

*Sumber Data : Bidang Sistem Informasi Pendapatan Bapenda*

No	Uraian	Miliar (Rp)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	8
A	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>214.280</b>	<b>230,46</b>	<b>271,45</b>	<b>177,04</b>	<b>-8.26</b>
1	Pendapatan Pajak Daerah	51.271	54,78	54,73	60,49	7,98
2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.652	19,27	22,18	19,28	13,62
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	7.055	8,56	10,64	13,68	19,77
4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136.301	147,85	183,89	83,57	-14,67



**Sasaran III:** Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan dalam pengelolaan pendapatan  
**Indikator :** Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah

Pada sasaran ke 3 ini terdapat pada Renstra Perubahan 2018-2023 untuk tahun ke 4 dimana jumlah aplikasi yang digunakan untuk menunjang pengelolaan sistem informasi pajak daerah sebanyak 5 jenis aplikasi. Target sasaran ini tercapai sebanyak 100% .

Realisasi untuk sasaran 3 tercapai sebanyak 100% dimana target penggunaan teknologi informasi terealisasi sebanyak 5 aplikasi yaitu :

1. SISMIOP ( Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
2. NTPD ( Nomor Tanda Daftar Pajak Daerah)
3. KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah )

4. SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah)
5. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah )

### **3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio PAD</b>	<b>10.50</b>	<b>9,43</b>	<b>11,47</b>	<b>7,69</b>		
1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	BB (5)	B (4)	BB (5)	BB (5)		
1.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan	6.50	7,57	17,79	-34,78		

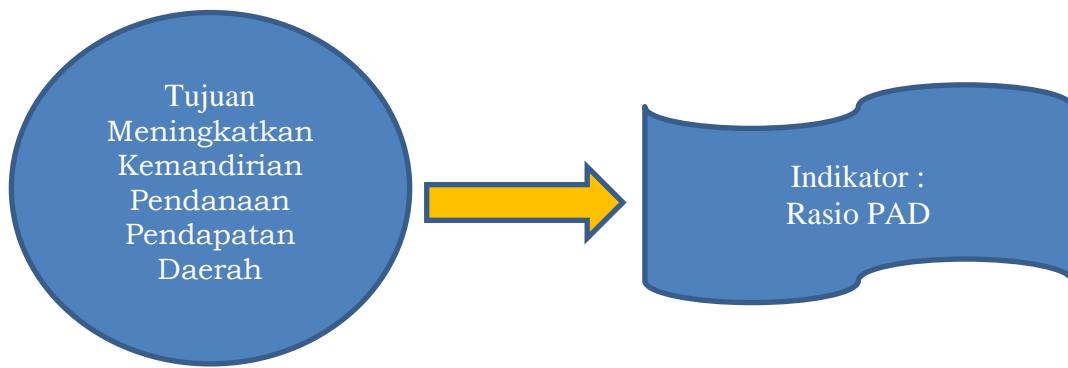
		Pendapatan Asli Daerah						
1.3	Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100			100		

Sumber data : Resntra Perubahan Bapenda 2018-2023

Berdasarkan tabel 3.4 Target Jangka Menengah pada Tujuan Renstra Tahun 2018-2023 sebesar 10.50% . Berdasarkan realiasasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 7,69% hal ini mengalami penurunan sebesar 73,24% .

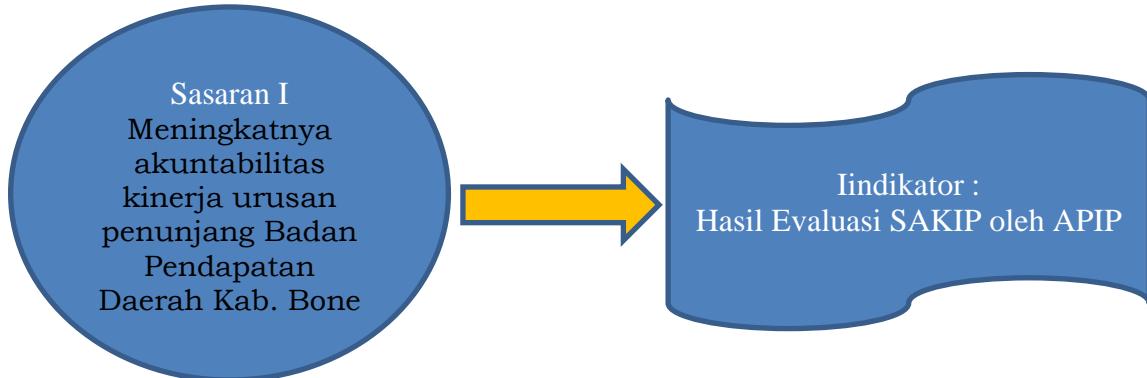
Pada sasaran 1.1 dan 1.3 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada sasaran 1.1 untuk tahun 2021 target pada renstra sebesar B dan terealisasi dengan perdikat BB , adapun target jangka menengah untuk sasaran 1.1 adalah BB. Adapun target jangka menengah pada sasaran 1.3 yaitu 100%.

Untuk sasaran 1.2 target jangka menengah sebesar 6.50 %. Berdasarkan realiasasi sampai dengan tahun ke empat tercapai dengan angka fluktuatif. Hal ini disebabkan dengan berbagai faktor. Salah satunya yaitu pencatatan penerimaan PAD lain-lain yang sah sering berubah-ubah setiap tahunnya.



Dari hasil evaluasi yang dilakukan target jangka menengah untuk Tujuan Renstra yaitu sebesar 10.50%, dengan

realiasi pada tahun 2019 yaitu 9,43 sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 11,47% dan Tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah 7,69%.

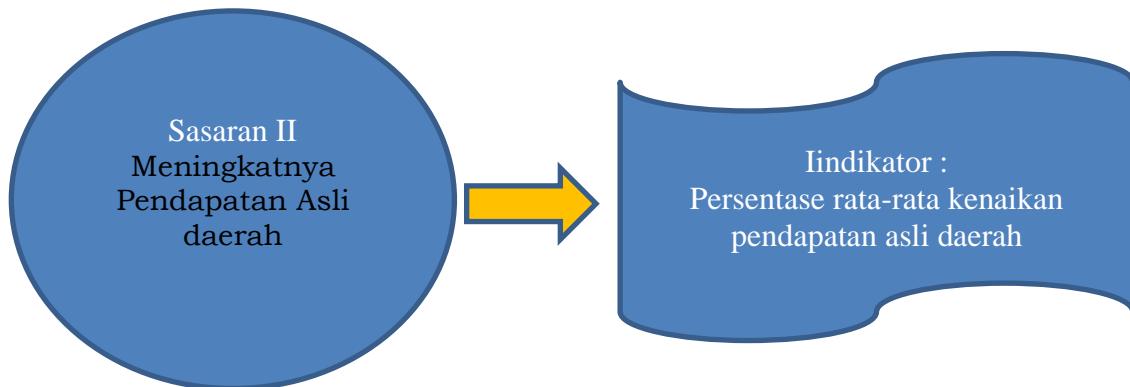


Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, target awal Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Periode 2018-2023 ditargetkan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan semakin di optimalkannya pengelolaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah . Pada Tahun 2019 ditarget dengan predikat B , sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 dengan predikat BB. Adapun realisasinya dapat dilihat sesuai dengan table .....tahun 2019 meraih predikat B dan tahun 2021 meraih predikat BB sehingga capaian kinerja untuk sasaran I melebihi 100%

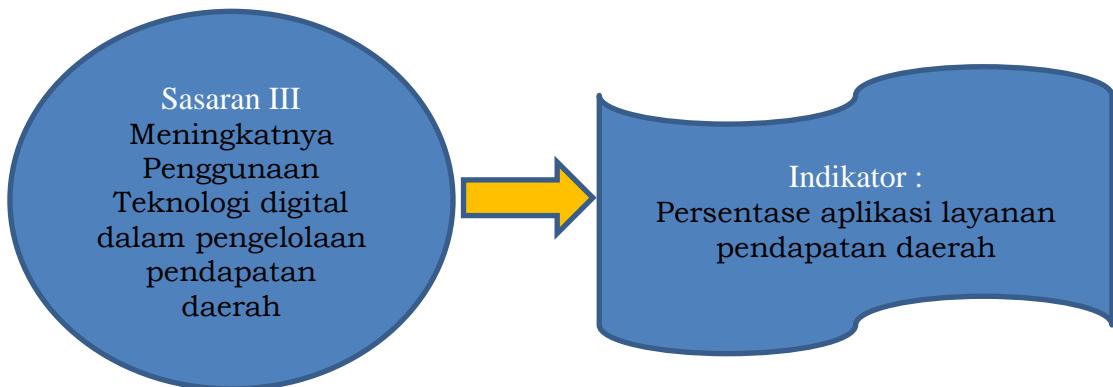
**Gambar 1.5**  
Dokumentasi Penerimaan Penghargaan  
Reformasi Birokrasi dengan Kategori Memuaskan.



Pencapaian di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu Terdapat aplikasi e-SAKIP, e-Planing dan penganggaran namun belum terintegrasi dan belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga belum efektif menjadi alat untuk memudahkan implementasi manajemen kinerja.



Untuk Realisasi Sasaran II Rencana Strategis Badan Pendapatan perode 2018-2023 persenatase capaian kinerjanya bersifat fluktuatif, hal ini disebabkan karena berbagai faktor. Capaian untuk tahun 2019 sebsar 7,57% meningkat 42,55% di tahun 2020 dengan capaian 17,79% . Adapun realisasi untuk tahun 2021 sebesar -34,78% dari target sebesar 13,35%. Hal ini disebakan oleh berbagai faktor



Pada Rencana strategis Perubahan Tahun 2018-2023 sasaran ke III yaitu meningkatnya Penggunaan Teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator persentase realisasi

aplikasi layanan pendapatan daerah, hal ini terealisasi dengan capaian 100%.

#### **4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan tidak termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar.

#### **5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran terdapat hal-hal yang menjadi faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan . Berikut ini adalah table ikhtisar pencapaian capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk Tahun 2021

*Tabel. 3.5*  
*Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja*

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-Rata Capaian	Predikat			
				>110	90=<s/d<110	60=<s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah</b>	Rasio PAD	7,69%	9.44				✓
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	125%		✓			

Daerah Kab. Bone							
Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	-260.52					✓
Meningkatnya Penggunaan Teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100		✓			

*Sumber data : Kerta kerja evaluasi kinerja*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indicator tujuan/sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 dalam kategori **tidak berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaia indicator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

**Tujuan I : Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah**

**Indikator : Rasio PAD**

Tujuan Pada rencana kerja tahun 2021 masuk kategori **tidak berhasil** hal ini disebabkan karena turunnya jumlah realisasi Pendapatan Daerah dimana target Rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 10,50% hanya terealisasi sebesar 7,69% hal ini diakibatkan karena pandemic covid-19. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

*Tabel 3.6 Realisasi PAD Tahun 2021*

Realisasi PAD Tahun 2021	Rp. 177,042,099,868
Realisasi Pendapatan Tahun 2021	Rp. Rp. 2,301,218,013,615
Rasio PAD terhadap Pendapatan	7,69 %

*Sumber Data : Kertas Kerja Evaluasi Kinerja Bapenda Tahun 2021*

Analisa penyebab kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Penurunan Realisasi Penerimaan ini disebabkan adanya peningkatan dan penurunan penerimaan dari 4 jenis Penerimaan PAD yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan Penerimaan Pajak Daerah yaitu dari Rp. 60,492,814,171 pada Tahun 2021 dari target sebesar Rp. 55,452,080,493 pada Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena Pajak Hotel dan Pajak Restoran terealisasi lebih dari 100% karena hotel dan restoran sudah mulai beroperasi secara normal setelah tingginya kasus covid-19 di Kabupaten Bone. Pajak Reklame dengan realisasi sebesar 125% dan Pajak Hiburan terealisasi sebesar 123,19 hal ini disebabkan karena omzet dari pelaku usaha hiburan mulai meningkat setelah.
2. Terdapat penurunan Penerimaan Retribusi Daerah yang hanya terealisasi sebesar 70,85% . Hal ini disebabkan karena adanya penurunan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum khususnya pada penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diakibatkan karena kurangnya minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit di masa pandemic covid-19.
3. Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdapat penerimaan sebesar Rp. 13.683,335,633 atau 91,00 % dari target penerimaan sebesar Rp 15,036,211,026,-.
4. Lain-lain PAD yang Sah terdapat sebesar Rp. 83, 577,016, 679,- atau 75,48 % dari target sebesar Rp. 110,724828,573 Tahun 2021 hal ini disebabkan karena menurunnya penerimaan dari sector jasa giro.

Berdasarkan penyebab tidak tercapainya tujuan diatas adalah hambatan yang ditemui dalam pencapaian tujuan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 yaitu

1. masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
3. inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncontrolable* oleh Bapenda.
4. luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
5. peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

**Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan  
penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone**  
**Indikator : Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP**

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indicator pada sasaran I dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai dengan predikat *BB* dengan realisasi sebesar 115,35% dari target B hal ini karena:

1. Adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan sampai pada dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Pemantauan dan evaluasi secara berkala atas capaian kinerja pada level Perangkat Daerah telah terlaksana
3. Cascading kinerja pada Badan Pendapatan daerah kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik.

Pencapain di atas telah melampaui target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu Terdapat aplikasi e-SAKIP, e-Planing dan penganggaran namun belum terintegrasi dan belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga

belum efektif menjadi alat untuk memudahkan implementasi manajemen kinerja

**Sasaran II : Meningkatnya Pendapatan Asli daerah**

**Indikator : Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah**

Sasaran II Pada rencana kerja tahun 2021 masuk dalam kategori **tidak berhasil** hal ini disebabkan karena Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indicator persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah tidak tercapai sesuai dengan target yaitu 13,35%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

*Tabel 3.7*

*Realisasi Perbandingan PAD Tahun 2020 dan Tahun 2021*

Realisasi PAD tahun 2020	Realisasi PAD tahun 2021	Capaian $\frac{(PAD\ N - (PAD\ -N)}{(-N)} \times 100$
Rp. 271.455.489.753	Rp. 177,042,099,868	- 34,78%

*Sumber data : Kertas kerja capaian kinerja*

Adapun penyebab dari tidak tercapainya sasaran II pada Rencana Kerja Tahun 2021 yaitu :

1. Akibat pandemi Covid-19, pendapatan daerah Kabupaten Bone mengalami penurunan yang signifikan, sama dengan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dana transfer dan rasionalisasi keuangan daerah yang berubah akibat adanya refocusing anggaran sehingga menurunnya target Pendapatan Asli Daerah
2. Retribusi Daerah dari sector penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit mengalami

penurunan karena berkurangnya minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit atau puskesmas dimasa pandemic

3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah juga mengalami penurunan karena penerimaan jasa giro berkurang karena tingginya arus kas daerah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu

- 1 Penggalian potensi obyek pajak yang harus dioptimalkan
2. Meningkatkan pelayanan bagi investor sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bone akan bertambah jumlah perusahaan / pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD
3. Badan Pendapatan Daerah Kab Bone mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam mendukung penerimaan pajak daerah ayng efisien dan akuntabel

**Sasaran III : Meningkatnya Penggunaan Teknologi digital  
dalam pengelolaan pendapatan daerah**

**Indikator : Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah**

Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah . Masuk dalam kategori berhasil hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung :

1. Upaya dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone dalam mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi dalam pembayaran pajak daerah

2. Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan lembaga keuangan daerah dalam penggunaan teknologi untuk mendukung penerimaan pendapatan daerah yang akuntabel

## **6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.8  
Efisiensi Sumber daya

	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi sumber daya
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
	1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8 (7/6*100)	1 (5-8)
1	Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	10.50	7.69	73.24	14,041,408,573.0	13,319,408,190.0	94.86	-21.62
1.1	Meningkatnya akuntabilitas	Hasil evaluasi SAKIP	B	BB	115.38	9,877,786,573.0	9,159,039,992.0	92.72	22.66

**LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone oleh APIP									
1.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6.50	-34.78	-535.08	3,231,259,100.0	3,229,148,379.0	99.93	-635.01
1.3	Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah	100	100	100	932,362,900.0	931,219,819.0	99.88	0.12

*Sumber Data : Bagian Keuangan Sekretariat Bapenda*

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Pada Sasaran 1.1 dengan capaian kinerja 115,38 % dan capaian anggaran 94.86%, menunjukkan bahwa sumber daya sebesar 22.66

Adanya peningkatan kualitas implementasi SAKIP mulai dari proses perencanaan, pengukuran hingga pelaporan kinerja dengan melibatkan seluruh stekholder internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, disamping itu semakin intensifnya proses pembinaan dan pengawasan internal oleh bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone selaku APIP terkait dengan implementasi SAKIP. Namun demikian masih diperlukan upaya peningkatan kinerja secara

menyeluruh untuk mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih maksimal lagi, berdasarkan tingkatan tertinggi akuntabilitas kinerja.

2. Pada Sasaran 1.2 dengan capaian kinerja -535.08% dan capaian anggaran 99.93%, menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar -635.01

Berdasarkan table diatas Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 7.69 persen dari target sebesar 10.50% untuk tahun 2021 hal ini disebabkan karena :

- a. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 177,042,099,868.00 atau sebesar 84.94% dari target yaitu Rp. Rp. 208,439,169,492,-
  - b. Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp. 70,85 % atau Rp. 19,288,933,385 dari target sebesar Rp. 27,226,049,400. Hal ini disebabkan karena Retribusi Pelayanan di Puskesmas hanya terealisasi sebesar 66,57% dan Retribusi Pelayanan di rumah sakit umum daerah hanya terealisasi sebesar 65,11% hal ini disebabkan kurangnya minat dari masyarakat untuk memeriksakan diri karena pandemic covid-19
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar 91,00% dari target sebesar Rp 15,036,221,026,- dan terlealisasi sebesar Rp 13,683,335,633,-
3. Pada Sasaran 1.3 dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99.88%, menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya sebesar 0.12
- Realisasi untuk sasaran 3 tercapai sebanyak 100% dimana target penggunaan teknologi informasi terealisasi sebanyak 5 aplikasi yaitu :
- a. SISMIOP ( Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak)
  - b. NTPD ( Nomor Tanda Daftar Pajak Daerah)
  - c. KSWPD (Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah )
  - d. SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah)
  - e. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah )

**LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

## **7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 3.9

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program /Keg/Sub Keg	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio PAD</b>							
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone	Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP							
			Penunjang urusan pemerintahan	persentase realisasi				

**LKJiP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

			daerah/kabupaten kota	Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten kota				
			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase realisasi cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	100	100	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	6	6	100	
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi & pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun	3	3	100	
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase cakupan penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah	100	100	100	

**LKJiP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

			Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi pengelola keuangan perangkat daerah	12	12	100	
			Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase Cakupan realisasi administrasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah	100	100	100	
			Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	1	1	100	
			Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Jumlah peserta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	75	75	100	

**LKJUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

		Pengolahan data retribusi daerah	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang dikelolah secara berkala	3	3	100	
		Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah	55	55	100	
		Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	10	10	100	
		Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	15.38	15.38	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	26	4	15.38	
		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	

**LKJdP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

			Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket penyediaan perlatan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	

**LKJUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan sesuai rencana kebutuhan	12	12	100	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	135	58	43.00	
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Percentase Cakupan realisasi Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	100		
			Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	6	4	66.67	
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Percentase cakupan realisasi Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	

**LKJiP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket Penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan	12	12	100	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor	12	12	100	
			Pemeliharaan Barang milik daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala	12	12	100	

**LKJdP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	12	100	
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	100	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah							
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target				
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah	100	101.14	101.14	

**LKJiP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

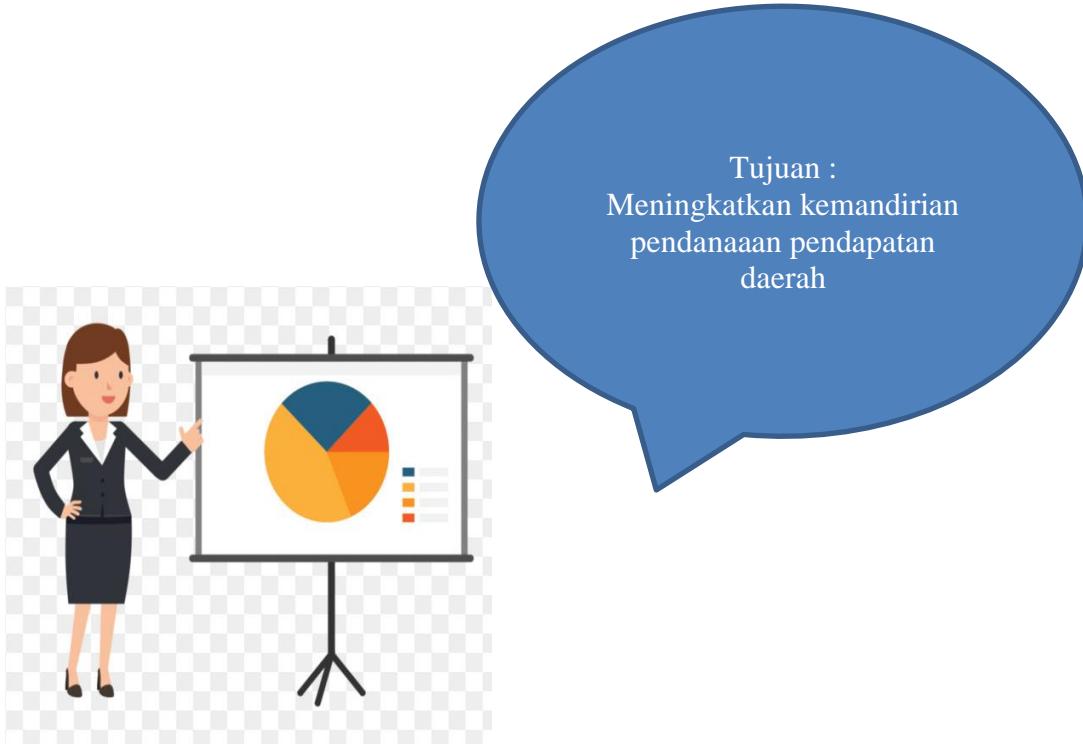
		Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	1	1	100	
		Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	200	200	100	
		Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah (penetapan)	7	7	100	
		Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	4	4	100	
		Penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih	610,560	617,505	101.14	

**LKJIP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

			Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kegiatan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	1	1	100	
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	3	3	100	
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	Persentase aplikasi layanan pendapatan daerah				100	101.14	101.14	
			Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataanya secara berkala	610,560	617,505	101.14	
			Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	4	4	100	
			Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah kegiatan layanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak daerah	6	6	100	

### Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:



Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah rasionya masih kecil . PAD berkontribusi sebesar 7,69%. Terhadap pendapatan. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah yaitu dengan meningkatkan penggalian objek penerimaan Pendapatan Asli daerah demi meningkatkan pendanaan yang mandiri dibidang pendapatan daerah

**Sasaran 1.1:**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk mewujudkan sasaran 1.1 yaitu :

1. Peningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja
2. Peningkatan sarana dan prasarana demi terlaksananya pelayanan perangkat daerah yang optimal

**Sasaran 1.2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk mewujudkan sasaran 1.1

**1. Ekstensifikasi Pendapatan**

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru. Penjaringan Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi Wajib Pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.

**2. Intensifikasi Pendapatan**

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada. Piutang Pajak Daerah merupakan salah satu permasalahan yang harus dapat diselesaikan dan akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, khususnya data piutang PBB-P2 yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Oleh karena itu, untuk piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa dapat dilakukan penghapusan sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.

### 3. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Pengutuhan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan daerah serta penyederhanaan proses bisnis.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone saat ini yaitu kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya penilai pajak dan juru sita. Peningkatan wawasan SDM melalui penyertaan aparat dalam setiap Diklat, Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan forum-forum lainnya.

Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan. Selain itu pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Badan

Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi.

Sasaran 1.3 : Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan sasaran 1.3 yaitu

1. Peningkatan Sarana & Prasarana system informasi pendapatan daerah
2. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi

### **8. Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 14,041,408,773 sebagaimana tabel sebagai berikut:

*Tabel 3.10  
Realisasi Anggaran Tahun 2021*

Uraian	Jumlah		Persen
	Anggaran	Realisasi	
<b>Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan Daerah</b>	<b>14,041,408,773</b>	<b>13,319,408,193</b>	<b>94.86</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>			
Sasaran 1.1			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang Badan Pendapatan	9,877,786,773	9,159,039,995	92.72

**LKJiP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

sasaran 1.2			
<b>Program Pengelolaan Pendapatan daerah</b>			
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	3,231,259,100	3,229,148,379	99.93
Sasaran 1.3			
Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan	932,362,900	931,219,819	99.88

## BAB IV

## PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk Tahun 2021 dengan rata-rata nilai capaian kinerja yaitu 9,44 % hal ini masuk dalam kategori tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor.

### B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasinya

Adapun Kendala yang di hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yaitu :

Berdasarkan penyebab tidak tercapainya tujuan diatas adalah hambatan yang ditemui dalam pencapaian tujuan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 yaitu

1. masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. belum opimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
3. inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncontrollable* oleh Bapenda.
4. luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
5. Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

Untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian target kinerja maka Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bone melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk mewujudkan **sasaran 1.1** yaitu :

1. Peningkatkan kualitas dokumen perangkat daerah yang terkait dengan akuntabilitas kinerja

2. Peningkatan sarana dan prasarana demi terlaksananya pelayanan perangkat daerah yang optimal

Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone untuk mewujudkan **sasaran 1.2** yaitu:

1. Ekstensifikasi Pendapatan
2. Intensifikasi Pendapatan
3. Penguatan Kelembagaan

Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan **sasaran 1.3** yaitu

1. Peningkatan Sarana & Prasarana system informasi pendapatan daerah
2. Pengembangan Sistem Pendataan Wajib Pajak & Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi



# *LAMPIRAN*



*Perjanjian Kinerja*  
Tahun 2021

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DR.H.A. FAHSAR. M, PADJALANGI, M.Si**

Jabatan : Bupati Bone

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 13 Oktober 2021

Pihak Kedua,

**Bupati Bone**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "fahsar".

**DR.H.A. FAHSAR. M, PADJALANGI, M.Si**

Pihak Pertama,

**Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kab. Bone**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "mab".

**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19660717 198603 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE**

<b>NO.</b>	<b>TUJUAN / SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kemandirian pendanaan pendapatan daerah .	Rasio PAD	10.50 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Badan Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	B
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah	13,35 %
4.	Meningkatnya Penggunaan Teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Aplikasi layanan pendapatan daerah	100 %

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 9,877,786,773
2.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 4,163,622,000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 14,041,408,773</b>

Watampone, 13 Oktober 2021

Pihak Kedua,

**Bupati Bone,**

**DR.H.A. FAHSAR. M, PADJALANGI, M.Si**

Pihak Pertama,

**Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bone**

**Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM**

Pangkat : Pembina Utsama Muda  
Nip. : 19660717 198603 1 009



# PENERIMAAN PAD

## *Tahun 2021*

**TARGET DAN REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KEADAAN S/D 31 DESEMBER 2021**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI			SELISIH	% SELISIH
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	2,368,347,840,769.00	2,051,653,158,446.23	249,565,567,408.82	2,301,218,725,855.05	(67,129,114,913.95)	97.17
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	208,439,169,492.00	156,721,019,068.23	20,321,793,039.82	177,042,811,108.05	(31,396,157,383.95)	84.94
4 1 01	PAJAK DAERAH	55,452,080,493.00	56,314,360,067.00	4,178,454,104.00	60,492,814,171.00	5,052,851,208.00	109.09
4 1 01 06	Pajak Hotel	602,339,807.00	660,712,771.00	93,091,105.00	753,803,876.00	151,464,069.00	125.15
4 1 01 06 03	Hotel Bintang Tiga	406,399,807.00	551,725,329.00	76,446,105.00	628,171,434.00	221,771,627.00	652.98
4 1 01 06 06	Hotel Bintang Satu	96,200,000.00	27,238,442.00	-	27,238,442.00	(68,961,558.00)	131.33
4 1 01 06 07	Hotel Melati Tiga	20,740,000.00	31,634,000.00	6,905,000.00	38,539,000.00	17,799,000.00	185.82
4 1 01 06 08	Hotel Melati Dua	22,500,000.00	17,870,000.00	1,550,000.00	19,420,000.00	(3,080,000.00)	86.31
4 1 01 06 09	Hotel Melati Satu	30,000,000.00	5,270,000.00	980,000.00	6,250,000.00	(23,750,000.00)	20.83
4 1 01 06 10	Rumah Kos	26,500,000.00	26,975,000.00	7,210,000.00	34,185,000.00	7,683,000.00	129.00
4 1 01 07	Pajak Restoran	3,969,009,302.00	4,126,499,579.00	762,965,371.00	4,889,464,950.00	920,455,648.00	123.19
4 1 01 07 01	Pajak Restoran	1,006,870,486.00	1,489,122,913.00	172,218,686.00	1,661,341,599.00	654,471,113.00	165.00
4 1 01 07 02	Pajak Rumah makan	774,595,898.00	329,827,519.00	60,992,205.00	390,819,724.00	(383,776,174.00)	50.45
4 1 01 02 03	Pajak Kafetaria	310,359,569.00	187,238,443.00	41,161,387.00	228,399,830.00	(81,959,739.00)	73.59
4 1 01 02 05	Pajak Warung	1,105,363,163.00	1,551,171,193.00	383,074,553.00	1,934,245,746.00	828,882,583.00	174.99
4 1 01 02 07	Pajak Jas Boga / Katering	771,820,186.00	569,139,511.00	105,518,540.00	674,658,051.00	(97,162,135.00)	87.41
4 1 01 08	Pajak Hiburan	181,000,000.00	106,426,439.00	18,867,165.00	125,293,604.00	(55,706,396.00)	69.22
4 1 01 08 01	Pajak Tontonan Film	120,000,000.00	82,868,500.00	12,737,000.00	95,605,500.00	(24,394,500.00)	79.67
4 1 01 08 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	12,000,000.00	-	-	-	(12,000,000.00)	-
4 1 01 08 05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam	30,000,000.00	23,557,939.00	6,130,165.00	29,688,104.00	(311,896.00)	98.96
4 1 01 08 06	Sirkus/Akrobat/Sulap	5,000,000.00	-	-	-	(5,000,000.00)	-
4 1 01 08 09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa	11,000,000.00	-	-	-	(11,000,000.00)	-
4 1 01 08 10	Pajak Pertandingan Olahraga	3,000,000.00	-	-	-	(3,000,000.00)	-
4 1 04	Pajak Reklame	1,724,216,925.00	2,141,263,175.00	22,600,500.00	2,163,863,675.00	439,646,750.00	125.50
4 1 04 01	Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron	1,317,715,925.00	1,695,441,925.00	22,600,500.00	1,718,042,425.00	400,326,500.00	130.38
4 1 04 02	Reklame Kain	400,000,000.00	442,821,250.00	-	442,821,250.00	42,821,250.00	110.71
4 1 04 03	Reklame Melekat/Stiker	2,088,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	912,000.00	143.68
4 1 04 04	Reklame Selobaran	4,413,000.00	-	-	-	(4,413,000.00)	-
4 1 05	Pajak Penerangan Jalan	23,184,514,459.00	22,263,573,996.00	2,288,387,572.00	24,551,961,568.00	1,367,447,109.00	105.90
4 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	23,184,514,459.00	22,263,573,996.00	2,288,387,572.00	24,551,961,568.00	1,367,447,109.00	105.90
4 1 07	Pajak Parkir	50,000,000.00	15,949,170.00	21,933,300.00	37,882,470.00	(12,117,530.00)	75.76
4 1 07 01	Pajak Parkir	50,000,000.00	15,949,170.00	21,933,300.00	37,882,470.00	(12,117,530.00)	75.76
4 1 08	Pajak Air Tanah	56,000,000.00	15,776,636.00	1,830,184.00	17,606,820.00	(38,393,180.00)	31.44
4 1 08 01	Pajak Air Tanah	56,000,000.00	15,776,636.00	1,830,184.00	17,606,820.00	(38,393,180.00)	31.44
4 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	27,125,000.00	9,300,000.00	36,425,000.00	1,425,000.00	104.07
4 1 09 01	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	27,125,000.00	9,300,000.00	36,425,000.00	1,425,000.00	104.07
4 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400,000,000.00	150,644,600.00	21,418,481.00	172,063,081.00	(227,936,919.00)	43.02
4 1 11 06	Lain-lain Mineral bukan Logam dan Batuan	400,000,000.00	150,644,600.00	21,418,481.00	172,063,081.00	(227,936,919.00)	43.02
4 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17,500,000,000.00	17,990,017,032.00	278,167,376.00	18,268,184,408.00	768,184,408.00	104.39
4 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	17,500,000,000.00	17,990,017,032.00	278,167,376.00	18,268,184,408.00	768,184,408.00	104.39
4 1 13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7,750,000,000.00	8,816,371,669.00	659,893,050.00	9,476,264,719.00	1,726,264,719.00	122.27
4 1 13 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7,750,000,000.00	8,816,371,669.00	659,893,050.00	9,476,264,719.00	1,726,264,719.00	122.27
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	27,226,049,400.00	15,971,486,570.00	3,317,546,815.00	19,289,033,385.00	(7,937,016,015.00)	70.85
4 1 02 01	RET. JASA UMUM	20,239,638,000.00	11,285,845,641.00	3,079,887,475.00	14,365,733,116.00	(5,873,904,884.00)	70.98
4 1 02 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14,015,000,000.00	6,659,290,641.00	2,670,560,975.00	9,329,851,616.00	(4,685,148,384.00)	66.57
4 1 02 01 0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	-	204,586,495.00	-	204,586,495.00	204,586,495.00	#DIV/0!
4 1 02 01 0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah	14,015,000,000.00	6,454,704,146.00	2,670,560,975.00	9,125,263,121.00	(4,889,734,879.00)	65.11
4 1 2 01 02	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebbersihan	250,000,000.00	250,500,000.00	7,820,000.00	258,320,000.00	8,320,000.00	103.33

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI			SELISH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 02 01 04	Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2,485,500,000.00	1,554,237,000.00	113,000,000.00	1,667,237,000.00	(818,263,000.00)	67.08
4 1 02 01 05	Ret. Pelayanan Pasar	2,576,818,000.00	2,106,768,000.00	194,456,500.00	2,301,224,500.00	(275,593,500.00)	89.30
4 1 02 01 05	Ret. Pelayanan Pasar (BAPENDA )	1,120,414,000.00	1,120,414,000.00	-	1,120,414,000.00	-	100.00
4 1 02 01 05 0001	a. Retribusi Pelataran	805,222,000.00	805,222,000.00	-	805,222,000.00	-	100.00
4 1 02 01 05 0002	b. Ret. Los	132,417,000.00	132,417,000.00	-	132,417,000.00	-	100.00
4 1 02 01 05 0003	c. Ret. Kios	182,775,000.00	182,775,000.00	-	182,775,000.00	-	100.00
4 1 02 01 05	Ret. Pelayanan Pasar ( PERDAGANGAN )	1,456,404,000.00	986,354,000.00	194,456,500.00	1,180,810,500.00	(275,593,500.00)	81.08
4 1 02 01 05 0001	a. Retribusi Pelataran	1,070,778,000.00	732,016,000.00	137,567,000.00	869,583,000.00	(201,195,000.00)	81.21
4 1 02 01 05 0002	b. Ret. Los	223,983,000.00	99,684,000.00	24,299,000.00	123,983,000.00	(100,000,000.00)	55.35
4 1 02 01 05 0003	c. Ret. Kios	161,643,000.00	154,654,000.00	32,590,500.00	187,244,500.00	25,601,500.00	115.84
4 1 02 01 06	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	175,000,000.00	15,150,000.00	-	15,150,000.00	(159,850,000.00)	8.66
4 1 2 01 07	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10,000,000.00	10,200,000.00	-	10,200,000.00	200,000.00	102.00
4 1 2 01 09	Ret. Penggantian Biaya Cetak Peta						#DIV/0!
4 1 2 01 13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	727,320,000.00	689,700,000.00	94,050,000.00	783,750,000.00	56,430,000.00	107.76
4 1 2 02	RET. JASA USAHA	2,482,411,400.00	1,907,059,640.00	240,584,340.00	2,147,643,980.00	(83,769,420.00)	86.51
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( a + b + c )	353,588,000.00	124,700,000.00	22,550,000.00	147,250,000.00	(206,363,000.00)	41.64
4 1 02 02 01 0001	a. Retribusi Penyewaan Tanah & Bangunan	135,113,000.00	68,900,000.00	13,050,000.00	81,950,000.00	(53,163,000.00)	60.65
4 1 02 02 01 0007	b. Dinas PU - Retribusi Pemakaian Alat ( Sewa Alat Berat )	175,000,000.00	21,800,000.00	-	21,800,000.00	(153,200,000.00)	12.46
	c. Dinas Perikanan - Retribusi Pemakaian Alat	43,475,000.00	34,000,000.00	9,500,000.00	43,500,000.00	25,000.00	100.06
4 1 2 01 02	Ret. Pasar Grosir / Pertokoan	71,798,400.00	80,780,000.00	8,260,000.00	89,040,000.00	17,241,600.00	124.01
4 1 2 01 02	Ret. Pasar Grosir / Pertokoan ( BAPENDA )	47,232,000.00	47,232,000.00	-	47,232,000.00	-	100.00
4 1 2 01 02	Ret. Pasar Grosir / Pertokoan ( PERDAGANGAN )	24,566,400.00	33,548,000.00	8,260,000.00	41,808,000.00	17,241,600.00	170.18
4 1 2 02 03	Ret.Jasa Usaha Tempat Pelelangan ( a + b )	886,525,000.00	956,986,000.00	64,653,000.00	1,021,639,000.00	135,114,000.00	115.24
	a. Dinas Peternakan	830,000,000.00	904,806,000.00	60,278,000.00	965,084,000.00	135,084,000.00	116.28
	b. Dinas Perikanan	56,525,000.00	52,180,000.00	4,375,000.00	56,555,000.00	30,000.00	100.05
4 1 2 02 04	Ret.Jasa Usaha Terminal	75,000,000.00	47,200,000.00	2,800,000.00	50,000,000.00	(25,000,000.00)	66.67
4 1 02 02 04 0003	Ret. Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan terminal	75,000,000.00	47,200,000.00	2,800,000.00	50,000,000.00	(25,000,000.00)	66.67
4 1 2 02 05	Ret.Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir ( a + b )	45,500,000.00	41,610,000.00	3,390,000.00	45,000,000.00	(500,000.00)	99.90
	a. Dinas Perhubungan	5,500,000.00	5,530,000.00	-	5,530,000.00	30,000.00	100.35
	b. bapenda	20,195,000.00	20,195,000.00	-	20,195,000.00	-	
	c. Dinas Perdagangan	19,805,000.00	15,885,000.00	3,390,000.00	19,275,000.00	(530,000.00)	97.32
4 1 2 02 07	Ret.Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	120,000,000.00	103,070,000.00	12,520,000.00	115,590,000.00	(4,410,000.00)	96.33
4 1 02 02 08	Ret.Jasa Usaha Pelay. Kepelabuhanan	5,000,000.00	4,502,000.00	-	4,502,000.00	(498,000.00)	90.04
4 1 02 02 08 0001	Ret. Pelayanan Kepelabuhanan	5,000,000.00	4,502,000.00	-	4,502,000.00	(498,000.00)	90.04
4 1 02 02 09	Ret.Jasa Usaha Tempat Rekreasi & OLGA ( a+b )	850,000,000.00	516,711,640.00	124,911,340.00	641,622,980.00	645,980.00	75.49
4 1 02 02 09 0001	Ret. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga ( a + b )	850,000,000.00	516,711,640.00	124,911,340.00	641,622,980.00	645,980.00	75.49
	a. Dinas Kebudayaan & Kepariwisataan	800,000,000.00	435,865,000.00	113,112,000.00	548,977,000.00	(251,023,000.00)	68.62
	b. Kantor Pemuda dan Olahraga	50,000,000.00	80,846,640.00	11,799,340.00	92,645,980.00	42,645,980.00	185.29
4 1 02 02 11	Ret. Penjualan Produk Usaha Daerah	75,000,000.00	31,500,000.00	1,500,000.00	33,000,000.00	(42,000,000.00)	44.00
4 1 02 02 11 0001	a. Dinas Perikanan ( Bibit & Benih Ikan )	25,000,000.00	23,500,000.00	1,500,000.00	25,000,000.00	-	100.00
4 1 02 02 11 0003	b. Dinas Pertanian ( Bibit & Benih Tanaman )	50,000,000.00	8,000,000.00	-	8,000,000.00	(42,000,000.00)	16.00
4 1 2 03	RET. PERIZINAN TERTENTU	4,504,000,000.00	2,778,581,289.00	(2,925,000.00)	2,775,656,289.00	(1,728,343,711.00)	61.63
4 1 2 03 01	Ret. Izin Mendirikan Bangunan / IMB	4,500,000,000.00	2,778,221,289.00	(2,925,000.00)	2,775,296,289.00	(1,724,703,711.00)	61.67
4 1 2 03 04	Ret. Izin Trayek	4,000,000.00	360,000.00	-	360,000.00	(3,640,000.00)	9.00
4 1 03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	15,036,211,026.00	9,862,746,248.00	3,820,589,385.00	13,683,335,633.00	(5,173,464,778.00)	91.00
4 1 03 02 01	Bagian Laba yang di bagikan kepada Pemerintah Daerah ( Deviden ) atas Penyertaan Modal pada BUMD	36,469,000.00	-	3,820,589,385.00	3,820,589,385.00	(36,469,000.00)	10,476.27
4 1 03 02 02	Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah	14,999,742,026.00	9,862,746,248.00	-	9,862,746,248.00	(5,136,995,778.00)	65.75

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI			SELISIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	110,724,828,573.00	74,572,426,183.23	9,005,202,735.82	83,577,628,919.05	(27,147,199,653.95)	75.48
4 1 4 01	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	14,315,444,538.00	644,641,520.00	83,496,222.00	728,137,742.00	(13,587,306,796.00)	5.09
4 1 04 01 02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	117,915,000.00	272,466,298.00	-	272,466,298.00	154,531,298.00	-
4 1 04 01 02 0002	PENJUALAN Alat ANGKUTAN	92,915,000.00	272,466,298.00	-	272,466,298.00	179,551,298.00	293.24
4 1 04 01 02 0004	HASIL ALAT PERTANIAN	25,000,000.00	-	-	-	(25,000,000.00)	-
4 1 04 01 03	Hasil Penjualan Gedung dan bangunan ( Pasar Palakka )	14,141,004,538.00	335,496,222.00	70,846,222.00	406,342,444.00	(13,734,662,094.00)	2.87
4 1 04 01 05	Hasil Penjualan aset Tetap lainnya	56,525,000.00	36,679,000.00	12,650,000.00	49,329,000.00	(7,196,000.00)	87.27
4 1 04 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak di pisahkan		60,351,000.00	17,090,000.00	77,441,000.00		
4 1 04 03 01	Hasil Sewa Barang Milik Daerah ( BMD )		60,351,000.00	17,090,000.00	77,441,000.00		
4 1 04 05	Penerimaan Jasa Giro	8,079,050,000.00	4,021,705,163.44	429,350,320.82	4,451,055,484.26	(3,627,994,515.74)	55.09
4 1 4 02 01	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	8,079,050,000.00	4,021,705,163.44	429,350,320.82	4,451,055,484.26	(3,627,994,515.74)	55.09
a. Jasa Giro Bank Sul-Sel		-	4,019,595,741.00	429,254,576.00	4,448,850,317.00	4,448,850,317.00	-
b. Jasa Giro B S M		-	113,697.00	-	113,697.00	113,697.00	-
c. Jasa Giro B R I		-	1,386,391.00	60,035.00	1,446,426.00	1,446,426.00	-
d. Jasa Giro BNI BONE		-	520,140.00	33,364.00	553,504.00	553,504.00	-
e. Jasa Giro Bank Mandiri		-	86,640.15	2,345.82	88,985.97	88,985.97	-
f. Jasa Giro Bank Muamalat		-	2,554.29	-	2,554.29	2,554.29	-
4 1 04 09	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lainnya	15,000,000.00	14,920,000.00	-	14,920,000.00	(80,000.00)	99.47
4 1 04 09 01	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lainnya	15,000,000.00	14,920,000.00	-	14,920,000.00	(80,000.00)	99.47
4 1 04 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3,490,853,400.00	1,228,401,525.70	-	1,228,401,525.70	(2,262,451,874.30)	-
4 1 04 11 01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3,490,853,400.00	1,228,401,525.70	-	1,228,401,525.70	(2,262,451,874.30)	-
4 1 04 13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4,500,000.00	2,250,000.00	91,565,265.00	93,815,265.00	89,315,265.00	-
4 1 04 13 02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha ( PU )	4,500,000.00	2,250,000.00	91,565,265.00	93,815,265.00	89,315,265.00	-
4 1 04 15	Pendapatan dari Pengembalian	9,819,980,635.00	953,768,592.09	87,127,403.00	1,040,895,995.09	(9,528,365,735.91)	2.97
4 1 04 15 03 0001	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunj.	9,819,980,635.00	261,093,327.09	30,521,572.00	291,614,899.09	(9,528,365,735.91)	2.97
4 1 04 15 04 0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas		692,675,265.00	56,605,831.00	749,281,096.00	749,281,096.00	
4 1 04 16	Pendapatan BLUD	75,000,000,000.00	67,646,388,382.00	8,296,573,525.00	75,942,961,907.00	942,961,907.00	101.26
4 1 04 16 01 0001	Pendapatan BLUD	75,000,000,000.00	67,646,388,382.00	8,296,573,525.00	75,942,961,907.00	942,961,907.00	101.26
4 1 04 18	Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( FKTP )						
4 1 04 18 01	Pendapatan Dana Kefitasi JKN pada ( FKTP )						

4 2	PENDAPATAN TRANSFER	2,013,060,742,466.00	1,789,685,116,532.00	185,937,502,453.00	1,975,622,618,985.00	(37,438,123,481.00)	98.14
4 2 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,856,843,116,967.00	1,702,293,557,657.00	141,475,861,532.00	1,843,769,419,189.00	(13,073,697,778.00)	99.30
4 2 01 01	DANA PERIMBANGAN	1,497,129,711,967.00	1,386,166,469,857.00	98,998,237,332.00	1,485,164,707,189.00	6,329,551,150.00	99.20
4 2 01 01 01	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL ( DBH )	27,476,856,967.00	27,414,699,503.00	8,881,071,806.00	36,295,771,309.00	1,288,850,977.00	132.10
4 2 01 01 03 0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11,748,717,942.00	12,143,865,734.00	4,645,552,381.00	16,789,418,115.00	5,040,700,173.00	142.90
4 2 01 01 03 0003	DBH PPn Pasal 25 dan Pasal 29 / WPOPDN	9,079,290,000.00	9,952,391,244.00	415,749,733.00	10,368,140,977.00	1,288,850,977.00	114.20
4 2 01 01 03 00013	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	1,357,619,150.00	962,707,500.00	394,911,650.00	1,357,619,150.00	-	100.00
4 2 01 01 03 0006	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas	773,508,000.00	589,246,710.00	606,551,858.00	1,195,798,568.00	422,290,568.00	154.59
4 2 01 01 03 0009	Bagi Hasil Mineral dan Batubara	3,612,486,000.00	2,969,317,203.00	2,607,957,482.00	5,577,274,685.00	1,964,788,685.00	154.39
4 2 01 01 03 00012	Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan ( REBOISASI )	52,659,082.00	40,244,332.00	27,033,121.00	67,277,453.00	14,618,371.00	127.76
	Bagi Hasil Cukai Tembakau	852,576,793.00	756,926,780.00	183,315,581.00	940,242,361.00	87,665,568.00	110.28
4 2 01 01 02	DANA ALOKASI UMUM	995,519,760,000.00	993,662,473,667.00	1,857,286,333.00	995,519,760,000.00	-	100.00
4 2 01 01 02 0001	Dana Alokasi Umum	995,519,760,000.00	993,662,473,667.00	1,857,286,333.00	995,519,760,000.00	-	100.00
4 2 01 01 03	DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK	182,410,955,000.00	109,052,325,188.00	59,562,156,693.00	168,614,481,881.00	(1,539,546,374.00)	92.44
4 2 01 01 03 0001	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Regular - PAUD	1,905,826,000.00	1,208,320,518.00	418,043,960.00	1,626,364,478.00	(279,461,522.00)	85.34
4 2 01 01 03 0002	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Regular - SD	18,169,512,000.00	12,182,435,510.00	4,795,470,068.00	16,977,905,578.00	(1,191,606,422.00)	93.44
4 2 01 01 03 0003	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Regular - SMP	8,165,779,000.00	5,149,007,119.00	1,756,687,029.00	6,905,694,148.00	(1,260,084,852.00)	84.57
4 2 01 01 03 0006	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Regular - SKB	200,000,000.00	139,814,375.00	59,773,125.00	199,587,500.00	(412,500.00)	99.79
4 2 01 01 03 00011	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Regular - perpustakaan Daerah	10,000,000,000.00	9,990,386,000.00	-	9,990,386,000.00	(9,614,000.00)	99.90
4 2 01 01 03 00013	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Regular - Pelayanan Kesehatan Dasar	27,227,944,000.00	11,131,244,880.00	11,554,094,857.00	22,685,339,737.00	(4,542,604,263.00)	83.32
4 2 01 01 03 00014	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Regular - Pelayanan Kesehatan Rujukan	44,806,075,000.00	15,357,448,108.00	28,089,604,629.00	43,447,052,737.00	(1,359,022,263.00)	96.97
4 2 01 01 03 00015	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Regular - Pelayanan Kefarmasian	5,608,631,000.00	1,142,148,544.00	3,280,795,324.00	4,422,943,868.00	(1,185,687,132.00)	78.86
4 2 01 01 03 00022	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Regular - Balai Pelatihan Kesehatan	53,000,000.00	52,900,000.00	-	52,900,000.00	(100,000.00)	99.81
4 2 01 01 03 00025	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Regular - KB	1,463,491,000.00	856,600,250.00	272,200,750.00	1,128,801,000.00	(334,690,000.00)	77.13
4 2 01 01 03 00028	DAK Fisik - Bidang Perkim-Afirmasi - Penyediaan Rumah Swadaya	1,809,329,000.00	1,356,996,750.00	-	1,356,996,750.00	(452,332,250.00)	75.00
4 2 01 01 03 00031	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Penugasan - Pembangunan Renovasi sarana & Prasarana	7,275,000,000.00	5,033,942,500.00	1,599,582,500.00	6,633,525,000.00	(641,475,000.00)	91.18
4 2 01 01 03 00032	DAK Fisik - Bidang Kelautan Pertanian - Penugasan - Penugasan	2,185,000,000.00	1,487,299,900.00	603,922,100.00	2,091,222,000.00	(93,778,000.00)	95.71
4 2 01 01 03 00034	DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	14,663,586,000.00	14,541,977,960.00	-	14,541,977,960.00	(121,608,040.00)	99.17
4 2 01 01 03 00035	DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan - Jalan	10,101,169,000.00	10,053,933,598.00	-	10,053,933,598.00	(47,235,402.00)	99.53
4 2 01 01 03 00039	DAK Fisik - Bidang Air Minum- Penugasan	12,461,422,000.00	8,112,573,100.00	2,992,354,900.00	11,104,928,000.00	(1,356,494,000.00)	89.11
4 2 01 01 03 00042	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan	9,715,191,000.00	7,252,965,950.00	2,914,557,300.00	10,167,523,250.00	452,332,250.00	104.66
4 2 01 01 03 00043	DAK Fisik - Bidang irigasi - Penugasan	6,600,000,000.00	4,002,330,126.00	1,225,070,151.00	5,227,400,277.00	(1,372,599,723.00)	79.20
4 2 01 01 04	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) NON FISIK	291,722,140,000.00	256,036,971,499.00	28,697,722,500.00	284,734,693,999.00	(6,987,446,001.00)	97.60
4 2 01 01 04 0002	DAK Non Fisik - BOS Afirmasi	1,542,440,000.00	-	-	-	(1,542,440,000.00)	-
4 2 01 01 04 0004	DAK Non Fisik - TPG PNSD ( TUNJANGAN PROFESI GURU )	212,746,795,000.00	212,746,795,000.00	-	212,746,795,000.00	-	100.00
4 2 01 01 04 0005	DAK Non Fisik - Guru PNSD	798,000,000.00	229,399,000.00	-	229,399,000.00	(568,601,000.00)	28.75
4 2 01 01 04 0006	DAK Non Fisik - TKG PNSD ( TAMBAHAN PENGHASILAN GURU )	764,662,000.00	638,400,000.00	18,162,500.00	656,562,500.00	(108,099,500.00)	85.86
4 2 01 01 04 0007	DAK Non Fisik - BOP PAUD	12,954,000,000.00	4,656,900,000.00	6,477,000,000.00	11,133,900,000.00	(1,820,100,000.00)	85.95
4 2 01 01 04 0008	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan & kesetaraan	8,331,300,000.00	7,505,750,000.00	-	7,505,750,000.00	(825,550,000.00)	90.09
4 2 01 01 04 0009	DAK Non Fisik - BOP Museum & Taman Budaya - Museum	600,000,000.00	570,125,000.00	-	570,125,000.00	(29,875,000.00)	95.02
4 2 01 01 04 00011	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	38,344,151,000.00	19,347,193,900.00	-	19,347,193,900.00	(18,996,957,100.00)	50.46
4 2 01 01 04 00012	DAK Non Fisik - BOKKB - pengawasan Obat & makanan	505,783,000.00	-	-	-	(505,783,000.00)	-
4 2 01 01 04 00013	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	2,402,988,000.00	-	-	-	(2,402,988,000.00)	-
4 2 01 01 04 00014	DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan	3,152,197,000.00	-	-	-	(3,152,197,000.00)	-
4 2 01 01 04 00015	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	7,560,321,000.00	7,380,496,385.00	22,202,560,000.00	29,583,056,385.00	22,022,735,385.00	391.29
4 2 01 01 04	Dak Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan perempuan & Anak	-	383,117,000.00	-	383,117,000.00	383,117,000.00	-
4 2 01 01 04	Dak Non Fisik - Dana Fasilitasi Penanaman Modal	-	322,573,000.00	-	322,573,000.00	322,573,000.00	-
4 2 01 01 04	Dak Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan & Pertanian	-	418,375,000.00	-	418,375,000.00	418,375,000.00	-
4 2 01 01 04 00017	DAK Non Fisik - BOKKB - Dana Pelayanan Administrasi kependudukan	2,019,503,000.00	1,837,847,214.00	-	1,837,847,214.00	(181,655,786.00)	91.00
4 2 01 02	DANA INSENTIF DAERAH ( DID )	25,925,549,000.00	25,925,549,000.00	-	25,925,549,000.00	-	100.00
4 2 01 02 01 0001	DID	25,925,549,000.00	25,925,549,000.00	-	25,925,549,000.00	-	100.00
4 2 01 05	DANA DESA	333,787,856,000.00	290,201,538,800.00	42,477,624,200.00	332,679,163,000.00	(1,108,693,000.00)	99.67
4 2 01 05 01 0001	DANA DESA	333,787,856,000.00	290,201,538,800.00	42,477,624,200.00	332,679,163,000.00	(1,108,693,000.00)	99.67

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI			SELISIH	%
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2 02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	156,217,625,499.00	87,391,558,875.00	44,461,640,921.00	131,853,199,796.00	(24,364,425,703.00)	84.40
4 2 02 02	PENDAPATAN BAGI HASIL	92,150,225,499.00	59,223,517,956.00	16,444,200,000.00	75,667,717,956.00	(16,482,507,543.00)	82.11
4 2 02 02 01	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	92,150,225,499.00	59,223,517,956.00	16,444,200,000.00	75,667,717,956.00	(16,482,507,543.00)	
4 2 02 02 01 0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB )	20,190,124,906.00	15,952,312,671.00	6,656,234,086.00	22,608,546,757.00	2,418,421,851.00	111.98
4 2 02 02 01 0002	Pendapatan Bagi Hasil Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN - KB )	17,736,946,409.00	6,539,034,283.00	1,197,917,557.00	7,736,951,840.00	(9,999,994,569.00)	43.62
4 2 02 02 01 0003	Pendapatan Bagi Hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB - KB )	26,140,154,184.00	12,096,239,882.00	1,982,707,295.00	14,078,947,177.00	(12,061,207,007.00)	53.86
4 2 02 02 01 0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Bawah Permukaan APT / ABT	83,000,000.00	52,326,999.00	5,842,856.00	58,169,855.00	(24,830,145.00)	70.08
4 2 02 02 01 0005	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok	28,000,000,000.00	24,583,604,121.00	6,601,498,206.00	31,185,102,327.00	3,185,102,327.00	111.38
4 2 02 03	BANTUAN KEUANGAN	64,067,400,000.00	28,168,040,919.00	28,017,440,921.00	56,185,481,840.00	(7,881,918,160.00)	
4 2 02 03 01	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH Daerah PROPINSI	10,067,400,000.00	5,033,700,000.00	5,033,700,000.00	10,067,400,000.00		
4 2 02 03 01 0002	Bantuan Keuangan dari Propinsi	54,000,000,000.00	23,134,340,919.00	22,983,740,921.00	46,118,081,840.00	(7,881,918,160.00)	85.40
4 3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	146,847,928,811.00	105,247,022,846.00	43,306,271,916.00	148,553,294,762.00	4,378,654,262.00	101.16
4 3 01	PENDAPATAN HIBAH	51,745,626,500.00	40,741,984,846.00	15,382,295,916.00	56,124,280,762.00	4,378,654,262.00	108.46
4 3 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11,540,000,000.00	2,718,535,321.00	8,917,919,147.00	11,636,454,468.00	96,454,468.00	100.84
4 3 01 04	Pendapatan Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi	40,205,626,500.00	38,023,449,525.00	6,464,376,769.00	44,487,826,294.00	4,282,199,794.00	110.65
4 3 01 04 01	Pendapatan Hibah dari Badan /Lembaga/Organisasi dalam Negeri	40,205,626,500.00	40,205,626,500.00	-	-	(40,205,626,500.00)	-
4 3 03	lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	95,102,302,311.00	64,505,038,000.00	27,923,976,000.00	92,429,014,000.00	(2,673,288,311.00)	97.19
4 3 03 01	Pendapatan Hibah Dana BOS	95,102,302,311.00	64,505,038,000.00	27,923,976,000.00	92,429,014,000.00	(2,673,288,311.00)	97.19
6	PEMBIAYAAN	388,069,408,492.00	89,306,046,236.23	0.00	89,259,688,755.23	(298,809,719,736.77)	23.00
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	388,069,408,492.00	89,306,046,236.23	0.00	89,259,688,755.23	(298,809,719,736.77)	23.00
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran daerah Tahun Sebelumnya	89,291,917,343.00	89,259,688,755.23	-	89,259,688,755.23	(32,228,587.77)	99.96
6 1 01 01	Pelampauan Penerimaan PAD	3,578,096,857.00	0.00	0.00	0.00	(3,578,096,857.00)	-
6 1 01 01 01	Pelampauan Penerimaan PAD - Pajak daerah	3,578,096,857.00	0.00	-	-	(3,578,096,857.00)	-
6 1 01 03	Pelampauan Penerimaan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,685,300,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	(1,685,111,000.00)	0.01
6 1 01 03 01	Pelampauan Penerimaan lain lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan Hibah	1,685,300,000.00	189,000.00	0.00	189,000.00	(1,685,111,000.00)	0.01
6 1 01 05	Penghematan Belanja	74,221,006,728.00	89,259,499,755.23	0.00	89,259,499,755.23	15,038,493,027.23	120.26
6 1 01 05 01	Penghematan Belanja - Belanja Operasional	74,221,006,728.00	89,259,499,755.23	-	89,259,499,755.23	15,038,493,027.23	120.26
6 1 01 08	Sisa Belanja Lainnya	9,807,513,758.00	0.00	-	0.00	-	
	Sisa di Bend. Pengeluaran BLUD tahun 2020	4,518,986,439.00	0.00	-	0.00	(4,518,986,439.00)	
	Sisa kjas di Bend. JKN Tahun 2020	4,598,808,673.00	0.00	-	0.00	(4,598,808,673.00)	
	Sisa Kas di Dana Bos 2020	689,718,646.00	-	-	-	-	
6 1 04	Penerimaan Pinjaman Daerah	298,777,491,149.00	-	-	-	-	
6 1 04 01	Penerimaan Daerah dari Pemerintah Pusat	298,777,491,149.00	-	-	-	-	
	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat - Sumber Latinya dengan Kewtentuan Peraturan Perundang Undangan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-	46,357,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BPJS ADD 1%	-	46,357,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	-	1,740,922,925.14	2,554,185,590.00	4,295,108,515.14	4,295,108,515.14	
	PENGEMBALIAN DANA 2021 ( KONTRA POS )	-	1,740,922,925.14	2,554,185,590.00	4,295,108,515.14	4,295,108,515.14	
	JUMLAH PENERIMAAN	2,756,417,249,261.00	2,140,959,204,682.46	249,565,567,408.82	2,390,478,414,610.28	(365,938,834,650.72)	86.72

Watampone, Januari 2022

An. KEPALA BAPENDA KAB. BONE  
Kabid Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

A. WIRABUANA AMRULLAH, S.S os

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19841114 200604 1 005

**REALISASI PENERIMAAN PAD KHUSUS YANG DIKELOLA BAPENDA KAB. BONE**  
**KEADAAN S/D 31 DESEMBER 2021**

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI 2	TARGET 3	REALISASI PENERIMAAN			% 7	SELISIH 8	KETERANGAN 9
			S/D BULAN LALU 4	TGL 01 - 31 Des 5	JUMLAH 6			
1	PAJAK HOTEL	602,339,807.00	660,712,771.00	93,091,105.00	753,803,876.00	125.15	151,464,069.00	
2	PAJAK RESTORAN	3,969,009,302.00	4,126,499,579.00	762,965,371.00	4,889,464,950.00	123.19	920,455,648.00	
3	PAJAK HIBURAN	181,000,000.00	106,426,439.00	18,887,165.00	125,293,604.00	69.22	(55,706,396.00)	
4	PAJAK REKLAME	1,724,216,925.00	2,141,263,175.00	22,600,500.00	2,163,863,675.00	125.50	439,646,750.00	
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	23,184,514,459.00	22,263,573,996.00	2,288,387,572.00	24,551,961,568.00	105.90	1,387,447,109.00	
6	PAJAK PARKIR	50,000,000.00	15,949,170.00	21,933,300.00	37,882,470.00	75.76	(12,117,530.00)	
7	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	400,000,000.00	150,644,600.00	21,418,481.00	172,063,081.00	43.02	(227,936,919.00)	
8	PAJAK AIR TANAH	56,000,000.00	15,776,636.00	1,830,184.00	17,606,820.00	31.44	(38,393,180.00)	
9	PAJAK SARANG BURUNG WALET	35,000,000.00	27,125,000.00	9,300,000.00	36,425,000.00	104.07	1,425,000.00	
10	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	17,500,000,000.00	17,990,017,032.00	278,167,376.00	18,268,184,408.00	104.39	768,184,408.00	
11	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH dan BANGUNAN	7,750,000,000.00	8,816,371,669.00	659,893,050.00	9,476,264,719.00	122.27	1,726,264,719.00	
12	RETRIBUSI PASAR	1,120,414,000.00	1,120,414,000.00	-	1,120,414,000.00	100.00	-	
	A. RET. PELATARAN	805,222,000.00	805,222,000.00	-	805,222,000.00	100.00	-	
	B. RET. LOS	132,417,000.00	132,417,000.00	-	132,417,000.00	100.00	-	
	C. RET. KIOS	182,775,000.00	182,775,000.00	-	182,775,000.00	100.00	-	
13	RET. PASAR GROSIR / PERTOKOAN	47,232,000.00	47,232,000.00	-	47,232,000.00	100.00	-	
14	RET. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	135,113,000.00	68,900,000.00	13,050,000.00	81,950,000.00	60.65	(53,163,000.00)	
	- RETRIBUSI PENYEWAAN TANAH & BANGUNAN	135,113,000.00	68,900,000.00	13,050,000.00	81,950,000.00	60.65	(53,163,000.00)	
15	RET. TEMPAT KHUSUS PARKIR	20,195,000.00	20,195,000.00	-	20,195,000.00	100.00	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>56,775,034,493.00</b>	<b>57,571,101,067.00</b>	<b>4,191,504,104.00</b>	<b>61,762,605,171.00</b>	<b>108.78</b>	<b>4,987,570,678.00</b>	

Watampone, Januari 2022

An. KEPALA BAPENDA KAB. BONE

A. WIRABUANA AMRULLAH, S.S.os  
 Pangkat : Penata Tk.I



# **MATRIX RENSTRA**

## **2018 -2023**

**Tabel T-C. 27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatkan Kemandirian Pendanaan Pendapatan daerah				RASIO PAD			10.50		10.62		10.50		10,50	
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan penunjang badan				Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B		B		BB		BB		A	
	5.02.01	Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten/kota		persentase realisasi Penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten/kota		100	10.793.363.096	100	10.167.867.025	100	11.721.176.228	100	32.682.406.349	
	5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persentase realisasi cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun (persen)		100	93.276.640	100	44.876.600	100	124.364.260	300	262.517.500	
	5.02.01.2.01.01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (dokumen)		6	13.889.240	5	33.229.600	5	36.552.560	16	83.671.400	
	5.02.01.2.01.02		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun (dokumen)		1	20.000.000			1	25.000.000	2	45.000.000	
	5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi & pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun (dokumen)		3	9.387.400	3	11.647.000	3	12.811.700	9	33.846.100	
			Jumlah Kegiatan Promosi/Pameran Hasil Kinerja pembangunan Daerah yang diikuti			1	50.000.000	1		1	50.000.000	3	100.000.000	
	5.02.01.2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase cakupan penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah		100	7.962.977.333	100	8.054.541.812	100	8.859.995.993	300	24.877.515.138	
	5.02.01.2.02		Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran jaminan/asuransi perbulan bagi		12	7.962.977.333	12	8.054.541.812	12	8.859.995.993	36	24.877.515.138	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
					pengelola keuangan perangkat daerah (orang/bulan)										
					Administiasi Pendapatan Daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase Cakupan realisasi administrasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah	100	512.466.028	100	418.822.710	100	505.704.981	300	1.436.993.719	
					Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun(dokumen)	1	54.492.900	1	47.128.330	1	51.841.163	3	153.462.393	
					Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Jumlah peserta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah (orang)	75	41.640.720	100		120	45.000.000	295	86.640.720	
					Pengolahan data retribusi daerah	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang dikelolah secara berkala (dokumen)	3	60.436.860	3	35.624.360	3	39.186.796	9	135.248.016	
					Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah (WR)	55	24.236.300	55	18.071.250	55	19.878.375	165	62.185.925	
					Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	10	331.659.248	10	317.998.770	10	349.798.647	30	999.456.665	
					Administiasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (persen)	100	196.263.000	100	25.450.000	100	214.267.500	300	435.980.500	
					Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana kebutuhan (pasang)	150	55.000.000	150		150	65.000.000	450	120.000.000	
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah laporan pendidikan & pelatihan aparat yang diikuti sesuai tugas dan fungsi (laporan)	4	120.000.000	4		4	120.000.000	12	240.000.000	
					Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis (orang)	26	21.263.000	10	25.450.000	11	29.267.500	47	75.980.500	
					Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah	100	351.369.440	100	302.278.870	100	332.506.757	300	986.155.067	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		5.02.01.2.06.02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	89.630.530	12	73.652.730	12	81.018.003	36	244.301.263	
		5.02.01.2.06.03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	13.860.110	12	11.838.140	12	13.021.954	36	38.720.204	
		5.02.01.2.06.04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	57.129.600	12	68.750.000	12	75.625.000	36	201.504.600	
		5.02.01.2.06.05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	44.480.000	12	43.278.000	12	47.605.800	36	135.363.800	
		5.02.01.2.06.06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (paket)		12	40.920.000	12	33.600.000	12	36.960.000	36	111.480.000	
		5.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah (laporan)		12	105.349.200	12	71.160.000	12	78.276.000	36	254.785.200	
		5.02.01.2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase Cakupan realisasi Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		100	276.801.570	100	55.209.500	100	117.730.450	300	449.741.520	
		5.02.01.2.07.01		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (unit)		3	70.000.000	1	25.000.000	3	27.500.000	7	122.500.000	
		5.02.01.2.07.05		Pengadaan meubel	Jumlah Pengadaan meubeleur (jenis)		3	35.000.000	3	7.497.000	3	8.246.700	9	50.743.700	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		5.02.01.2.07.06		Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan perlatan dan mesin lainnya (jenis)		6	121.801.570	2	22.712.500	2	24.983.750	10	169.497.820	
		5.02.01.2.07.11		Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya (paket)		1	50.000.000	1		1	57.000.000	3	107.000.000	
		5.02.01.2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Percentase cakupan realisasi Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	932.308.865	100	971.878.533	100	1.069.066.386	300	2.973.253.784	
		5.02.01.2.08.02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket Penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan (rekening)		12	69.355.000	12	72.000.000	12	79.200.000	36	220.555.000	
		5.02.01.2.08.04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor setiap bulan (paket)		12	862.953.865	12	899.878.533	12	989.866.386	36	2.752.698.784	
		5.02.01.2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Percentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100	467.900.220	100	294.809.000	100	497.539.900	300	1.260.249.120	
		5.02.01.2.09.01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala (paket)		12	147.180.000	12	157.938.000	12	173.731.800	36	478.849.800	
		5.02.01.2.09.06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (paket)		12	24.145.000	12	19.150.000	12	21.065.000	36	64.360.000	
		5.02.01.2.09.09		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1	150.000.000	1		1	173.250.000	3	323.250.000	
				Pemeliharaan/	Jumlah paket Pemeliharaan/										

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		5.02.01.2.09.10		rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (paket)		1	146.575.220	1	117.721.000	1	129.493.100	3	393.789.320
	2 Meningkatnya Pendapatan Asli daerah				Persentase rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah (persen)			13,35		6,50		6,50		26,35
		5.02.04	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target		100	2.773.857.735	100	3.593.047.237	100	6.131.512.869	100	11.948.417.841
		5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah		100	2.773.857.735	100	3.743.047.237	100	6.131.512.869	300	11.948.417.841
		5.02.04.2.01.01		Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah (dokumen)		1	97.417.320	1	85.000.000	1	300.000.000	3	482.417.320
		5.02.04.2.01.03		Penyaluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah peserta yang mengikuti penyaluhan (orang)		200	100.000.000	200	60.000.000	200	300.000.000	600	460.000.000
		5.02.04.2.01.08		Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah (penetapan jenis pajak)		7	130.000.000	7	60.000.000	7	200.000.000	21	390.000.000
		5.02.04.2.01.10		Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah dokumen pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi (dokumen)		4	90.000.000	4	75.000.000	4	300.000.000	12	465.000.000
		5.02.04.2.01.11		Penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih (wajib pajak)		610.560	786.337.870	610.660	1.752.059.240	610.760	3.000.000.000	1.831.980	5.538.397.110
		5.02.04.2.01.12		Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah kegiatan Penyelesaian keberatan pajak daerah (kegiatan)		1	70.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000	3	770.000.000
		5.02.04.2.01.13		Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kegiatan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah (kegiatan)		1	467.371.960	3	70.008.650	3	231.512.869	7	768.893.479
		5.02.04.2.01.14		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah		2	526.060.000	2	50.000.000	2	200.000.000	0	996.060.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		5.02.04.2.01.14		pengawasan pengelolaan retribusi daerah	pengawasan pengelolaan retribusi daerah (kegiatan)			550.000.000		50.000.000		50.000.000		880.000.000	
	3 Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam			Percentase aplikasi layanan pendapatan daerah (aplikasi layanan)			100		100		100		100		
		5.02.04.2.01.05		Pendaftaran dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataannya secara berkala (laporan Wajib Pajak)		610.560	183.007.000	610.660	130.000.000	610.760	200.000.000	1.831.980	513.007.000	
		5.02.04.2.01.06		Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah (dokumen)		4	163.662.785	4	160.979.347	4	300.000.000	12	624.642.132	
		5.02.04.2.01.07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (kegiatan)		1	150.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	3	1.050.000.000	
		5.02.04.2.01.09		Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah kegiatan layanan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak daerah (kegiatan)		6	682.458.920	6	700.000.000	6	1.150.000.000	18	2.532.458.920	

Meningkatnya  
Pendapatan Asli  
Daerah













**CASCADING**

**CASCADING KINERJA RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BONE**

VISI-MISI KAB.BONE 2018-2023	MASYARAKAT KAB. BONE YANG MABESSA(MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA)								
MISI RPJMD KAB.BONE 2018-2023	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)								
TUJUAN RPJMD KAB. BONE 2018-2023	Mengembangkan Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari KKN								
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan Kemandirian Pendapatan Pendapatan Daerah								
INDIKATOR TUJUAN	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah								
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan pendapatan daerah							Meningkatnya PAD	
INDIKATOR SASARAN	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP							Meningkatnya penggunaan Percentase rata-rata kenaikan PAD Percentase Aplikasi Layanan	
PENANGGUNG JAWAB SASARAN RENSTRA	Sekretaris				Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kabid Perencanaan & Pengembangan Pendapatan daerah , Kabid Pengelolaan sistem Informasi Pendapatan daerah, Kabid Pengendalian & evaluasi Pendapatan daerah				
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Pengelolaan Pendapatan daerah	
SASARAN PROGRAM	Predikat SAKIP							Peningkatan rata-rata PAD setiap tahun	
INDIKATOR PROGRAM	Percentase Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kab/Kota							Percentase Realisasi Pendapatan daerah terhadap pencapaian target	
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	SEKRETARIS						KABID PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL, KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGELOLAAN SISTEM		
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah

INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Realisasi cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Persentase cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase cakupan realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah terhadap pencapaian target	
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	SEKRETARIS							KABID PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL, KABID PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN DAERAH, KABID PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH		
SUB 1 KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkappannya	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas	Perencanaan pengelolaan retribusi daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Pendataan & Pendaftaran Objek Pajak Daerah
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedianya dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah	Terealisasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya untuk aparat	Terlaksananya Penyediaan Peralatan & Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	terlaksananya pengadaan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Komunikasi/informasi (internet) sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan peorangan dinas atau kendaraan	Tercapainya realisasi retribusi daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Terlaksananya pendataan & pendaftaran objek pajak daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan dan iuran/jaminan perbulan bagi pengelola keuangan perangkat daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas bagi pegawai perangkat daerah sesuai rencana	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah paket Penyediaan jasa komunikasi (internet) sesuai rencana kebutuhan setiap bulan	Jumlah laporan pemeliharaan kendaraan operasional jabatan yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkal	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelolah pendataannya secara berkala
SUB 2 KEGIATAN	Koordinasi dan PenyusunaN dokumen RKA-SKPD		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan meubel	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Pengolahan Pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah		Terlaksananya Diklat/Bimtek berdasarkan tugas dan fungsi bagi ASN Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur Kantor sesuai rencana kebutuhan	terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Wajib Pajak daerah yang mengikuti sosialisasi pajak daerah	terlaksananya Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	tersedianya data pajak daerah

INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Jumlah laporan pendidikan & pelatihan aparat yang diikuti sesuai tugas dan fungsi	Jumlah paket penyediaan perlatan rumah tangga perkantoran sesuai	Jumlah Pengadaan meubeleur	Jumlah realisasi jasa pelayanan umum kantor setiap bulan	Jumlah paket Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peserta penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Jumlah dokumen pemeliharaan dan pelaporan
SUB 3 KEGIATAN	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Penyediaan bahan logistik kantor	Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pengolahan data retribusi daerah	Penetapan wajib pajak daerah	Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersusunnya laporan capaian kinerja & ikhtisar	Terlaksananya bimbingan teknis yang diikuti oleh aparat	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai sesuai rencana kebutuhan	Terlaksananya Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersusunnya data retribusi daerah yang akurat	tersusunnya dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah	Terlaksananya Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 3	Jumlah dokumen evaluasi & pelaporan capaian kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah paket penyediaan bahan logistik makanan dan minuman bagi pegawai sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Pengadaan perlatan dan mesin lainnya	Jumlah paket Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah dokumen data penerimaan retribusi daerah yang dikelolah secara berkala	Jumlah dokumen penetapan jenis pajak atas ketetapan pajak daerah	Jumlah kegiatan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	
SUB 4 KEGIATAN			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Penetapan wajib retribusi daerah	Penelitian & Verifikasi data pelaporan pajak daerah	Pelayanan & Konsultasi Pajak daerah	
SASARAN SUB KEGIATAN			Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	terlaksananya Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	tersusunnya penetapan retribusi daerah	tersusunnya dokumen pajak yang diteliti dan diverifikasi	terlaksananya pelayanan dan konsultasi pajak daerah	
INDIKATOR SUB KEGIATAN 4			Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah paket Pengadaan sarana & prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Penetapan wajib retribusi daerah	Jumlah dokumen pajak yang diteliti dan verifikasi	Jumlah kegiatan Pelayanan & Konsultasi Pajak daerah	
SUB 5 KEGIATAN			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	Penagihan Pajak daerah		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

SASARAN SUB KEGIATAN	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Tersusunnya data retribusi daerah	Terlaksananya penagihan pajak daerah	Terlaksananya kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN 5	Jumlah paket Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditagih	Jumlah kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
SUB 6 KEGIATAN	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah
SASARAN SUB KEGIATAN	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Terselesaikannya keberatan pajak daerah	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah
INDIKATOR SUB KEGIATAN 6	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan	Jumlah kegiatan penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan retribusi daerah
Pendataan & Pendaftaran Objek Pajak Daerah				
Terlaksananya Pendataan & Pendaftaran Objek Pajak Daerah				
Jumlah laporan wajib pajak daerah yang dikelola pendataannya secara berkala				





**CROSS CUTTING**

# <sup>w</sup>SASARAN I



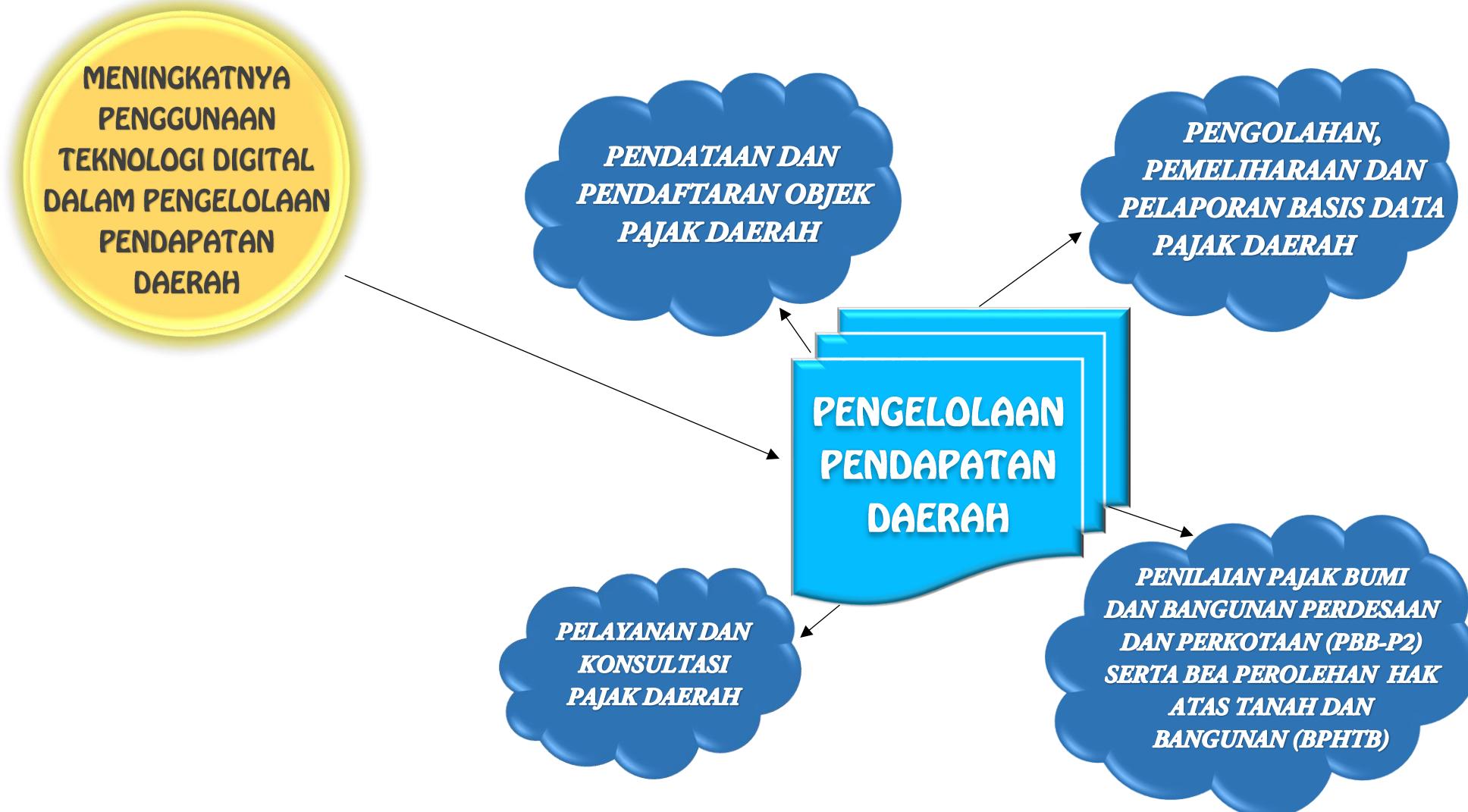
1. INSPEKTORAT DAERAH KAB. BONE
2. SEKRETARIAT DAERAH KAB. BONE
3. BAPPEDA KAB./BONE
4. BKAD KAB. BONE

## SASARAN II



1. DINAS PERHUBUNGAN
2. DINAS PETERNAKAN
3. DINAS PARIWISATA
4. DINAS PERINDUSTRIAN
5. DINAS PERDAGANGAN
6. DINAS KESEHATAN
7. BLUD
8. DLH
9. DPTSM
10. PLN
11. DINAS PEMUDA & OLAH RAGA

## SASARAN III



1. BANK SULSELBAR
2. CAMAT
3. LURAH